Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Proyek Penguatan Sistem Kesehatan

Kementerian Kesehatan Indonesia – Oktober 2023

DAFTAR ISI

1. Deskripsi Proyek 1
2. Tujuan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan 3
3. Identifikasi dan Analisa Pemangku Kepentingan 3
3.1 Metodologi 3
3.2 Pihak Terkena Dampak dan Pihak Lain yang Berkepentingan 3
3.3 Individu atau Kelompok Rentan 5
4. Program Pelibatan Pemangku Kepentingan 6
4.1 Ringkasan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Dilakukan Selama Persiapan Proyek 6
4.2 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan 6
5. Transparansi Kegiatan Pengadaan 7
6. Keterbukaan Informasi 7
7. Sumber Daya & Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan ... 8
7.1 Sumber Daya 8
7.2 Fungsi dan tanggung jawab pengelola 9
8. Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism,* GRM) 9
8.1 Deskripsi GRM 9
9. Pemantauan dan Pelaporan 10

LAMPIRAN

LAMPIRAN A IDENTIFIKASI DAN ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI, SIHREN DAN INPULS
TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: SOPHI
TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: SIHREN
TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: InPULS
LAMPIRAN B RINGKASAN KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TELAH DILAKUKAN
LAMPIRAN C DOKUMENTASI KEGIATAN KONFERENSI VENDOR
LAMPIRAN D DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK PENGUNGKAPAN DOKUMEN PROYEK DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
LAMPIRAN E RENCANA PROGRAM PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI, SIHREN DAN INPULS
TABEL RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI
TABEL RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SIHREN
TABEL RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN InPULS
LAMPIRAN F LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN FOCAL POINT PERSIAPAN PROYEK SIHREN, SOPHI DAN INPULS
LAMPIRAN G DIAGRAM ALIR DARI SALURAN PENANGANAN KELUHAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

ADB	Asian Development Bank
AIIB	Asian Infrastructure Investment Bank
ASPAK	Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
Aspaki	Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia
BAPETEN	Badan Pengendali Tenaga Nuklir
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAST	Berita Acara Serah Terima
BPJS Kesehatan	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CAPD	Dialisis Peritoneal secara rawat jalan berkelanjutan (*Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis*)
CPMU	Unit Pengelola Proyek Pusat (*Central Project Management Unit*)
DTPK	Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan
ESCOP	Kode Praktik Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Code of Practice)*
ESCP	Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan*)
ESF	Kerangka Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Framework)*
ESS	Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards)*
Gakeslab	Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia
GRM	Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism*)
HRH	Sumber daya manusia untuk kesehatan (*Human Resources for Health*)
HSS	Proyek Penguatan Sistem Kesehatan Indonesia (*Indonesia Health System Strengthening Project*)
InPULS	Penguatan Sistem Laboratorium Indonesia (*Public Laboratory System Strengthening*)
IsDB	Islamic Development Bank
KB	Keluarga Berencana
Kemkes	Kementerian Kesehatan
Kesling	Direktorat Jenderal Kesehatan Lingkungan
Kesmas	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
KGTK	Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
KIA	Kesehatan Ibu dan Anak
KJSU	Kanker, jantung, stroke and uronefrologi
KKP	Kantor Kesehatan Pelabuhan
Koor. Kel. Subs Yanmas	Koordinator Keluhan Sub Pelayanan Masyarakat
Labkesda	Laboratorium Kesehatan Daerah
Labkesmas	Laboratorium kesehatan masyarakat
Labkesmas	Laboratorium Kesehatan Masyarakat
LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
P2P	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
PAP	Orang yang Terkena Dampak (*Project Affected Persons*)

PBJ	Pengadaan Barang/Jasa
PERNEFRI	Perhimpunan Nefrologi Indonesia
PJ	Penjabat
PKR	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
PMU	Unit Pengelola Proyek (*Project Management Unit)*
POM	Manual Operasional Proyek (*Project Operation Manual)*
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPI	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pusjak	Pusat Kebijakan
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
Rifaskes	Riset Fasilitas Kesehatan
Rokeu	Biro Keuangan
Rokom	Biro Komunikasi
Rokomyanlik	Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
Rokomyanmas	Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
Roren	Biro Perencanaan
RSUPN	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
SEP	Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan)*
SIHREN	Penguatan Jaringan Rujukan Layanan Kesehatan Indonesia (*Strengthening Indonesia's Healthcare Referral Network*)
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SK PPID	Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
SOPHI	Penguatan Layanan Kesehatan Primer di Indonesia (*Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia*)
Sub Koor. Kel. Sub-Subs Dumas	Sub Koordinator Keluhan Sub-Sub Pengaduan Masyarakat
Tenkes	Tenaga Kesehatan
UKL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup
UKP	Upaya Kesehatan Perseorangan
UPL	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UPT	Unit Pelaksana Teknis
Yankes	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

(*Stakeholder Engagement Plan,* SEP)

1. Deskripsi Proyek

Proyek Penguatan Sistem Kesehatan di Indonesia atau *Health System Strengthening Project* ("Proyek HSS") bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan masyarakat dengan meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan fungsional di seluruh Indonesia. Rancangan Proyek mengacu kepada tiga komponen Proyek milik Kementerian Kesehatan ("Kemenkes") yang diajukan dalam *Blue Book* dan *Green Book*, yang menggunakan mekanisme pembayaran langsung kepada vendor untuk kegiatan pengadaan, pengoperasian, dan pemeliharaan dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar, rumah sakit rujukan dan peralatan laboratorium kesehatan, serta komponen keempat untuk kegiatan pengelolaan proyek, digitalisasi dan pelatihan. Pengaturan komponen Proyek tersebut antara lain:

- **Komponen 1: Pengadaaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan peralatan ke pelayanan kesehatan dasar di seluruh Indonesia "SOPHI",** yang bertujuan untuk berkontribusi ke pengadaan peralatan yang hemat energi, ramah lingkungan dan, jika memungkinkan dan dapat diterapkan, peralatan *telemedicine* untuk semua Posyandu, Pustu dan Puskesmas, serta laboratorium kesehatan masyarakat Tingkat 1 di seluruh Indonesia. Jenis dan jumlah peralatan, serta lokasi fasilitas kesehatan yang akan menerima peralatan, akan tergantung dari hasil kajian kesenjangan (*gap analysis*) secara komprehensif yang dilakukan oleh Kemenkes dengan didukung Bank Dunia dan mitra pendanaan lainnya (AIIB dan ADB) selama persiapan Proyek, dimulai dengan Data ASPAK 2022. Meskipun seluruh kegiatan pengadaan direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2024, kegiatan pengiriman peralatan akan dilakukan secara bertahap tergantung kepada kesiapan dari masing-masing fasilitas kesehatan penerima peralatan. Hal ini sejalan dengan hasil observasi dari konteks sektoral, dimana banyak fasilitas kesehatan, terutama yang berada di daerah terpencil dan pedesaan, yang akan membutuhkan tambahan waktu untuk dapat memperoleh kapasitas sumber daya manusia dan utilitas (koneksi internet dan listrik yang stabil) yang diperlukan untuk dapat terhubung dan mengoperasikan, serta memelihara peralatan yang dikirim secara benar dan berkelanjutan. Pengiriman secara bertahap akan berdasarkan pada kriteria kesiapan fasilitas yang datanya dikumpulkan dan dilaporkan oleh 514 Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang berada di wilayah administratif mereka.
- **Komponen 2: Pengadaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan peralatan ke fasilitas rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia "SIHREN"** yang bertujuan untuk berkontribusi ke pengadaan peralatan yang hemat energi, ramah lingkungan dan, jika memungkinkan dan dapat diterapkan, peralatan *telemedicine* untuk pengolah data dan sistem informasi untuk register Kanker, Jantung, Stroke dan Uronefrologi (KJSU) untuk semua rumah sakit di tingkat Madya, Utama dan Paripurna di seluruh Indonesia. Jenis dan jumlah peralatan, serta lokasi fasilitas kesehatan yang akan menerima peralatan, akan tergantung dari hasil kajian kesenjangan (*gap analysis*) secara komprehensif yang yang dilakukan oleh Kemenkes dengan didukung Bank Dunia dan mitra pendanaan lainnya, selama persiapan Proyek, dimulai dengan Data Rifaskes 2019. Selain itu, Proyek SIHREN memiliki ruang lingkup program penguatan jejaring layanan rujukan KJSU yang terdiri dari kegiatan program pengampuan dari RS pengampu ke RS yang diampu dan register KJSU. Program pengampuan meliputi kegiatan pelatihan dalam layanan

KJSU pada berbagai jenjang (Paripurna, Utama, dan Madya), workshop, diskusi kasus, pendampingan pelayanan dan *proctorship* yang dilakukan secara bertahap hingga mencapai target kompetensi yang diampu serta evaluasi kegiatan. Program Pengampuan bertujuan untuk penyebaran akses ke layanan KJSU, kemampuan layanan yang ditunjukkan dengan stratifikasi pelayanan pada RS target, sehingga membentuk RS dengan kompetensi stratifikasi layanan KJSU tertinggi nasional pada strata Paripurna, strata tertinggi yang menjadi rujukan tertinggi yaitu Utama di wilayah provinsi, dan stratifikasi layanan Madya di wilayah Kabupaten/Kota. Sasaran kegiatan adalah tenaga medis, perawat ataupun tenaga kesehatan lainnya yang berperan dalam layanan KJSU. Register KJSU meliputi pengembangan sistem informasi terpadu yang utamanya bertujuan untuk pencatatan dan pelaporan penyakit sesuai gejala klinis guna mencapai pengumpulan pendataan *clinical outcome* layanan KJSU. Meskipun tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas diperkirakan akan lebih kecil di tingkat rujukan, kriteria kesiapan akan tetap berlaku dan pengiriman secara bertahap akan diterapkan untuk komponen ini. Komponen ini akan didanai bersama dengan AIIB dan berkoordinasi dengan pembiayaan paralel IsDB untuk pendanaan peralatan di tingkat rumah sakit.

- **Komponen 3: Pengadaan, pemasangan, pengoperasian dan perawatan peralatan di tingkat 2, 3, 4, dan 5 dari fasilitas laboratorium kesehatan di seluruh Indonesia "InPULS",** yang bertujuan untuk berkontribusi ke pengadaan peralatan yang hemat energi, ramah lingkungan dan, jika memungkinkan dan dapat diterapkan, peralatan *telemedicine* untuk semua laboratorium kesehatan masyarakat di tingkat 2, 3, 4 dan 5. Jenis dan jumlah peralatan, serta lokasi fasilitas kesehatan yang akan menerima peralatan, akan tergantung dari hasil kajian kesenjangan secara komprehensif (*gap analysis*) yang dilakukan oleh Kemenkes dengan didukung oleh Bank Dunia dan mitra pendanaan lainnya, selama persiapan Proyek, dimulai dengan data laboratorium kesehatan atau Labkesmas. Kriteria kesiapan fasilitas juga akan berlaku, dan pengiriman secara bertahap akan dilakukan.

  Untuk memenuhi kriteria kesiapan, Pemerintah Indonesia, melalui Kemenkes, telah berkomitmen untuk memenuhi persyaratan sumber daya manusia, infrastruktur, kesediaan peralatan dan pengelolaan limbah, untuk didanai oleh APBN dan PHLN. Tim Bank Dunia akan memverifikasi pemenuhan kriteria tersebut sebelum menyetujui distribusi peralatan ke fasilitas kesehatan dan menetapkan protokol untuk verifikasi.
- **Komponen 4: Pengelolaan proyek, administrasi, digitalisasi dan pelatihan di seluruh komponen SOPHI, SIHREN dan InPULS,** yang akan mencakup pengelolaan komponen SOPHI, InPULS dan SIHREN termasuk pengoperasian *Central Project Management Office* (CPMO), *Central Procurement Unit* (CPU), dan *Project Management Unit* (PMU), serta dukungan tim *Information Technology* (IT). Komponen ini juga menyediakan pendanaan untuk pemantauan dan evaluasi, layanan konsultasi, penelitian, khususnya yang berkaitan dengan *telemedicine*, Register KJSU dan peralatan yang mendukung Artificial Intelligence (AI), pengembangan sistem data terintegrasi untuk penilaian dan inventarisasi kesiapan fasilitas, serta pelatihan penting untuk sumber daya kesehatan (*Human Resources for Health*, HRH).

Proyek disiapkan dengan mengacu kepada Kerangka Lingkungan dan Sosial Bank Dunia (*World Bank Environment and Social Framework*, ESF). Berdasarkan Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standard*, ESS) 10 tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi, untuk memastikan konsultasi yang bermakna dan pelibatan yang inklusif terhadap proyek, dokumen Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Engagement Plan,* SEP) akan disiapkan, proporsional dengan sifat dan skala proyek serta potensi risiko dan dampaknya, untuk kegiatan pelibatan pemangku kepentingan yang efektif dan berkontribusi kepada rancangan proyek dan pelaksanaannya. Dokumen SEP akan memastikan pelaksana Proyek untuk menyediakan pemangku

kepentingan dengan informasi yang tepat waktu, relevan, dapat dipahami dan dapat diakses, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang sesuai secara budaya, yang bebas dari diskriminasi atau intimidasi.

Dikarenakan cakupan projek adalah kegiatan pengadaan barang, dokumen SEP ini juga mencakup elemen transparansi pengadaan dan pengungkapan publik untuk kegiatan pembelian alat kesehatan.

2. Tujuan Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Tujuan keseluruhan dari SEP adalah untuk menentukan program pelibatan masyarakat, termasuk pengungkapan informasi ke masyarakat dan konsultasi di seluruh siklus Proyek. SEP menguraikan tata cara bagi tim Proyek untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan mencakup mekanisme untuk masyarakat agar dapat menyampaikan kekhawatiran, memberikan umpan balik, atau menyampaikan keluhan tentang kegiatan Proyek atau kegiatan apapun yang berkaitan dengan Proyek.

3. Identifikasi dan Analisa Pemangku Kepentingan

3.1 Metodologi

Untuk memenuhi pendekatan praktek terbaik (*best practice*), Proyek akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut dalam pelibatan pemangku kepentingan:

- *Keterbukaan dan pendekatan siklus proyek:* Pelibatan masyarakat untuk proyek akan disusun selama siklus proyek, dilakukan secara terbuka, bebas dari manipulasi, diskriminasi atau intimidasi.
- *Partisipasi yang terinformasi dan umpan balik:* Informasi akan disediakan dan didistribusikan secara luas diantara semua pemangku kepentingan dalam format yang sesuai; peluang diberikan untuk mengkomunikasikan umpan balik pemangku kepentingan, dan untuk menganalisa dan menangani komentar dan kekhawatiran.
- *Inklusivitas dan sensitivitas:* Identifikasi pemangku kepentingan dilakukan untuk mendukung komunikasi yang lebih baik dan membangun hubungan yang efektif. Proses partisipasi untuk proyek bersifat inklusif. Semua pemangku kepentingan setiap saat didorong untuk terlibat didalam proses konsultasi. Akses ke informasi disediakan secara merata ke semua pemangku kepentingan. Kepekaan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan merupakan prinsip utama yang mendasari pemilihan metode pelibatan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan yang mungkin beresiko terkucilkan dari memperoleh manfaat proyek, termasuk masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan kepekaan terhadap budaya dari kelompok etnis yang beragam.
- *Fleksibilitas:* berbagai sarana atau cara akan digunakan untuk memastikan kegiatan pelibatan dilakukan dengan baik untuk mengatasi hambatan pelibatan dengan pemangku kepentingan, dengan pertimbangan faktor sosial, konteks budaya, dinamika gender, dll.

3.2 Pihak Terkena Dampak dan Pihak Lain yang Berkepentingan

Secara keseluruhan, tidak ada dampak sosial yang merugikan terkait kegiatan Proyek. Proyek akan berkontribusi dalam mengatasi permasalahan distribusi yang tidak merata, buruknya pemeliharaan peralatan medis, dan rendahnya kapasitas petugas kesehatan dalam mengoperasikan peralatan kesehatan. Risiko sosial dapat berupa risiko kesehatan dan keselamatan pekerja pemasok utama/pekerja vendor yang terlibat dalam pendistribusian dan pemasangan alat kesehatan, serta

kesehatan dan keselamatan operator alat kesehatan/staf medis dan pasien dari potensi kegagalan pengoperasian alat kesehatan yang baru.

Pemasok utama proyek adalah pemasok yang, secara berkelanjutan, menyediakan langsung kepada proyek peralatan medis yang penting bagi fungsi inti dari proyek. Pemasok utama ini akan dikontrak oleh proyek melalui pengadaan terpusat secara nasional, untuk menyediakan dan mengirimkan peralatan medis ke fasilitas kesehatan yang menjadi penerima manfaat proyek.

Pemangku kepentingan, menurut definisi ESS10 ini, mengacu pada individu atau kelompok yang (a) terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak proyek ("Orang atau Orang yang Terkena Dampak Proyek"); dan (b) mungkin mempunyai kepentingan dalam proyek ("Pihak Berkepentingan Lainnya"). Berikut adalah rangkuman daftar pemangku kepentingan Proyek. Informasi lebih lengkap mengenai pemangku kepentingan di komponen SOPHI, SIHREN dan InPULS, dan peran mereka dalam Proyek dijelaskan dalam tabel pada Lampiran A laporan ini.

Berikut merupakan daftar ringkas dari Orang yang Terkena Dampak Proyek (*Project Affected Persons,* PAP), yang sebagian besar terdampak secara positif, dan ringkasan perannya dalam komponen Proyek. Karena Proyek ini hanya untuk kegiatan pengadaan, dampak negatif dapat diabaikan.

SOPHI:

- Vendor dan pekerjanya yang menyediakan, mendistribusikan, dan mengirimkan peralatan medis kepada penerima manfaat proyek dan vendor yang mendukung pengolahan limbah medis yang dihasilkan dari pengadaan alat kesehatan;
- Masyarakat setempat, khususnya pasien Puskesmas terpilih yang memanfaatkan peralatan kesehatan tersebut;
- Kader pilihan masyarakat yang memberikan sosialisasi dan pelayanan kepada masyarakat dalam pemanfaatan alat kesehatan dan melakukan pelaporan pemanfaatan alat kesehatan.

SIHREN:

- Vendor, industri alat kesehatan, yang menyediakan alat kesehatan untuk proyek dan pekerjanya yang melakukan pendistribusian, pemasangan dan pemeliharaan alat kesehatan tersebut dan vendor yang mendukung pengolahan limbah medis yang dihasilkan dari pengadaan alat kesehatan;
- Komunitas, khususnya pasien, dari rumah sakit terpilih yang menerima manfaat dari penggunaan peralatan medis untuk diagnostik, terapeutik, dan rehabilitasi;
- Tenaga kesehatan yang berkomitmen terhadap pelaksanaan penurunan emisi, yang merencanakan, mengelola dan melakukan pemantauan terhadap penggunaan peralatan dan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan, serta pekerja yang langsung mengoperasikan peralatan kesehatan tersebut.

InPULS:

- Vendor dan pekerjanya yang menyediakan, mendistribusikan, dan mengirimkan peralatan medis ke lokasi proyek; vendor yang melakukan pengiriman sampel laboratorium; dan vendor yang mendukung pengelolaan limbah medis;
- Masyarakat yang menerima pelayanan dan penggunaan peralatan kesehatan laboratorium kesehatan masyarakat.

Berikut adalah ringkasan daftar Pihak Berkepentingan Lainnya dari Proyek:

- Badan legislatif (Parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat) yang memberikan persetujuan terhadap program Proyek dan penganggaran, pengawasan pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi;
- Kementerian dan Lembaga Pemerintah yang terlibat dalam pengembangan strategi implementasi, berkoordinasi dalam pengembangan daftar peralatan medis (misalnya rendah emisi karbon, non-merkuri), mengawasi proses pengadaan, mengalokasikan anggaran untuk mendukung Proyek, menginspeksi dan memberi persetujuan izin serta mengawasi penggunaan peralatan medis;
- Pemangku kepentingan/ahli yang terlibat dalam akreditasi fasilitas medis;
- Pejabat pemerintah dan badan pemerintahan daerah, pejabat tingkat desa penerima hibah proyek dan pemberi informasi kebutuhan hibah, berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam pengembangan strategi program, melakukan pengelolaan keuangan, memfasilitasi proses perizinan daerah, dan memberikan dukungan anggaran untuk keberlanjutan pelaksanaan proyek (misalnya anggaran operasi dan pemeliharaan);
- Lembaga keuangan internasional yang menjadi penyandang dana proyek (Bank Dunia, ADB, AIIB, IsDB) dan mengawasi pelaksanaan Proyek;
- LSM yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat terhadap proyek dan memantau pelaksanaan proyek serta media komunikasi/advokasi dampak positif proyek terhadap masyarakat;
- Media massa yang mensosialisasikan informasi, memantau pelaksanaan, dan mengumpulkan serta mensosialisasikan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan proyek (misalnya transparansi pengadaan, distribusi, dll);
- Organisasi masyarakat informal (misalnya komunitas keagamaan) yang mungkin mempunyai pandangan positif atau negatif terhadap Proyek dan dapat mempengaruhi masyarakat dengan pandangan mereka.

3.3 Individu atau Kelompok Rentan

ESS10 juga mensyaratkan identifikasi PAP (individu atau kelompok) yang, karena keadaan khusus mereka, mungkin dirugikan atau rentan yang mengacu pada definisi ESS10, yaitu mereka yang mungkin lebih mungkin terkena dampak proyek dan/atau lebih terbatas daripada yang lain dalam kemampuan mereka untuk mengambil manfaat dari manfaat proyek. Individu/kelompok ini kemungkinan besar akan dikecualikan dari/tidak dapat berpartisipasi penuh dalam proses konsultasi utama dan dengan demikian mungkin memerlukan tindakan dan/atau bantuan khusus untuk berpartisipasi.

Sesuai dengan definisi tersebut, proyek mengidentifikasi individu/kelompok yang kurang beruntung/rentan dari SOPHI dan SIHREN sebagai masyarakat yang (a) tinggal di daerah terpencil/terbelakang, daerah perbatasan dan/atau pulau-pulau (Daerah Terpencil, Perbatasan, dan Kepulauan, DTPK), termasuk masyarakat adat, dan (b) penyandang disabilitas. Individu/kelompok-kelompok ini, karena lokasi, keterbatasan fisik, tantangan dalam hal bahasa dan/atau kendala lainnya, memiliki kemampuan yang lebih terbatas dibandingkan dengan yang lain dalam memperoleh manfaat proyek, dan mungkin memerlukan tindakan dan/atau bantuan khusus untuk dapat mengakses manfaat. Proyek akan mengirimkan peralatan medis ke fasilitas kesehatan umum yang terbuka bagi siapa saja yang ingin menggunakan layanannya, termasuk mereka yang berada di area terpencil dan kurang terlayani. Oleh karena itu, Proyek tidak mengantisipasi adanya risiko terkait pengucilan sosial terhadap individu/kelompok rentan, dikarenakan rancangan dan tujuan dari Proyek yang fokus pada perluasan akses ke layanan kesehatan dasar, termasuk ke area yang kurang terlayani.

Sementara untuk InPULS, peralatan medis akan diberikan kepada laboratorium kesehatan, yang tidak secara langsung memberikan layanan mereka kepada individu atau kelompok masyarakat, tetapi kepada fasilitas kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kategori individu/kelompok yang kurang beruntung/rentan untuk komponen InPULS ini tidak berlaku.

4. Program Pelibatan Pemangku Kepentingan

4.1 Ringkasan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang Dilakukan Selama Persiapan Proyek

Berikut adalah rangkuman dari kegiatan pertemuan dan diskusi yang dilakukan pada komponen SIHREN, SOPHI, dan InPULS dengan para pemangku kepentingan. Rincian lebih lanjut mengenai pertemuan dan diskusi ini tersedia di Lampiran B.

- Rapat koordinasi dengan rumah sakit khusus untuk masing-masing penyakit KJSU, untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, peralatan medis, jenis layanan dan pengembangan program pendukung serta pengampuan ke semua jejaring rumah sakit secara langsung atau melalui pendelegasian ke pengampu regional;
- Diskusi dengan organisasi dan asosiasi terkait pelayanan KJSU, membahas kebutuhan dan strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, serta peningkatan pelayanan;
- Rapat koordinasi pembahasan kebutuhan perizinan, penganggaran dan pemantauan kegiatan operasional proyek dengan instansi pemerintah terkait, misalnya dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) untuk izin pemanfaatan peralatan radiasi, dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk mekanisme pembayaran, Dinas Kesehatan untuk izin operasional dan pemantauan kegiatan, dll.
- Pertemuan Proyek secara berkala dengan organisasi daerah termasuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Perencanaan kebutuhan alat kesehatan di setiap Kabupaten/Kota dan laboratorium.

Sosialisasi dan pelibatan pemangku kepentingan proyek akan terus berjalan selama tahap pelaksanaan proyek. Pada tanggal 31 Agustus 2023, Kemenkes telah melakukan sosialisasi proyek sebagai bagian dari Peluncuran Nasional Program Pelayanan Kesehatan Primer Terpadu dan Rencana Pengembangan Penguatan Kesehatan, dengan pemangku kepentingan dari Kementerian dan Lembaga, Mitra Pengembangan, Organisasi Profesi, Akademisi, LSM dan fasilitas kesehatan. Topik diskusi antara lain nota kesepakatan (MoU) program sinergi transformasi kesehatan, peluncuran konsorsium layanan kesehatan primer, peluncuran website program (https://ayosehat.kemkes.go.id/) dan layanan komunikasi Kemenkes, dll. Foto dokumentasi kegiatan terdapat pada Lampiran B.

4.2 Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan

Program Pelibatan dirancang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan, dalam bahasa dan format yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan sasaran, sesuai dengan norma budaya, dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak secara berbeda atau tidak proporsional oleh Proyek, atau kelompok masyarakat yang memerlukan paparan informasi yang disesuaikan (misalnya, individu dengan disabilitas, buta huruf, gender tertentu, bahasa berbeda, atau hambatan akses). Strategi pelibatan yang direncanakan untuk seluruh komponen Proyek adalah sebagai berikut:

- Koordinasi atau pertemuan formal dengan pemangku kepentingan dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk badan Legislatif, Kementerian, Lembaga, dll;

- Kunjungan lapangan, lokakarya dan pelatihan dengan penerima manfaat seperti rumah sakit, puskesmas, atau laboratorium kesehatan, serta dengan Direktorat Jenderal dan Dinas Kesehatan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Konsultasi dengan PAP dan pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk dengan masyarakat, masyarakat adat, tokoh masyarakat dan agama di sekitar fasilitas penerima manfaat;
- Sosialisasi dan konsultasi publik kepada masyarakat umum, media massa, LSM, organisasi profesi, dan lain-lain;
- Pertemuan kegiatan pengadaan dan usulan persyaratan kontrak dengan vendor pemasok dan distribusi alat kesehatan. Konferensi vendor pertama telah dilakukan pada 29 September 2023.

Kegiatan pelibatan pemangku kepentingan, antara lain akan mengungkapkan dokumen lingkungan dan sosial yang relevan termasuk dokumen SEP, Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF), Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial Proyek (ESCP), mekanisme penanganan keluhan (GRM) dari dampak lingkungan dan sosial proyek, dan informasi perkembangan proyek, dll. Informasi lebih rinci mengenai rencana program pelibatan pemangku kepentingan tersedia di Lampiran E.

5. Transparansi Kegiatan Pengadaan

Dokumen SEP akan berkontribusi pada rancangan persyaratan transparansi dan pengungkapan kegiatan pengadaan. Kegiatan pengadaan dalam proyek ini meliputi pengadaan peralatan medis dan laboratorium baik yang mengikuti pengadaan kompetitif terbuka internasional maupun nasional. Kegiatan pengadaan di muka (*advance procurement*) diharapkan dilakukan dalam proyek ini, yang akan dimulai setelah Strategi Pengadaan Proyek untuk Pembangunan (*Project Procurement Strategy for Development,* PPSD) dan Rencana Pengadaan (*Procurement Plan,* PP) selesai.

Tim pengadaan Kementerian Kesehatan, akan mengontrak vendor peralatan medis yang akan menyediakan, mendistribusikan dan memberikan bantuan teknis dalam pemasangan dan panduan penggunaan peralatan medis. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, proyek ini akan mengikuti persyaratan Pemberitahuan Pengadaan Khusus (*Specific Procurement Notice)* dalam mempublikasikan informasi: (a) di situs web yang dapat diakses bebas, jika tersedia; (b) pada sekurang-kurangnya satu surat kabar yang beredar secara nasional di Indonesia; atau (c) dalam berita resmi atau situs web Kementerian Kesehatan sebagai Badan Pelaksana. Dalam hal pengadaan kompetitif terbuka internasional yang diikuti oleh vendor internasional, mekanismenya mengikuti persyaratan *International Open Competitive Bid*, yang informasinya harus dipublikasikan secara online di *United Nations Development Business* (UNDB). Konferensi untuk para vendor telah dilakukan di tanggal 29 September 2023, dengan dihadiri 322 peserta yang bergabung secara luring dan 421 peserta yang hadir secara daring melalui media Zoom meeting. Diskusi dalam konferensi ini meliput pembahasan mengenai metode pengadaan (e-catalog, NCB atau ICB), metode evaluasi (kriteria/harga yang menjadi penilaian dan gabungan teknis), isu seputar produk lokal, spesifikasi dan jumlah dari peralatan medis dan tahapan pencapaian pengadaan. Notulensi dan dokumentasi foto kegiatan ini ada di Lampiran C. Konferensi vendor yang kedua direncanakan untuk dilaksanakan pada 7 November 2023, untuk pembahasan mengenai arahan tender.

6. Keterbukaan Informasi

Penerapan SEP ini merupakan komitmen Peminjam sesuai dengan ESCP Proyek. Sebagai bagian dari persiapan, proyek telah melakukan konsultasi publik untuk keseluruhan desain proyek, usulan kegiatan dan dokumen pengelolaan lingkungan dan sosial pada 6 Oktober 2023. Seluruh dokumen upaya perlindungan, termasuk SEP, ESCP, dan ESMF telah diungkapkan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa

Inggris di situs web Kemenkes (https://link.kemkes.go.id/multi/Links/lists/konsultasipublikHSS) sebelum konsultasi publik dilakukan. Setelah diungkapkan, dokumen ini akan dibuka untuk umum selama 7 hari untuk menampung masukan terhadap proyek dan rencana pengelolaan risiko lingkungan dan sosial proyek.

Konsultasi publik telah dilakukan secara daring, dengan dihadiri 180 peserta dari pemerintah pusat (BAPETEN, BAPPENAS), dinas kesehatan di daerah, fasilitas dan laboratorium kesehatan daerah, asosiasi profesi, vendor dan juga badan internasional dan pihak-pihak pemberi dana proyek. Konsultasi publik mensosialisasikan dan membahas latar belakang proyek, komponen dan tata waktu pelaksanaan proyek, risiko lingkungan dan sosial proyek dan rencana pengelolaan, saluran penanganan keluhan dan umpan balik proyek, komitmen lingkungan dan sosial proyek, dsb. Ringkasan hasil kegiatan dan dokumentasi foto dari konsultasi publik ini ada di Lampiran D.

Dari masukan yang diterima melalui konsultasi publik dan dokumen yang diungkapkan, dokumen ESMF dan SEP diperbarui dan diungkapkan kembali di situs web Kemenkes untuk menampung pandangan dan kekhawatiran para pemangku kepentingan, dengan notulen hasil konsultasi dan dokumentasi yang disertakan sebagai lampiran dokumen.

Melalui pengungkapan dokumen-dokumen ini kepada publik, diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait Proyek dan para pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan selama pelaksanaan Proyek. Dengan demikian, akan memberikan peluang bagi Proyek untuk memperbaiki rancangan dan pelaksanaannya melalui umpan balik yang diterima, berupa saran, informasi tambahan, dan keluhan.

7. Sumber Daya dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan

7.1 Sumber Daya

Pengelolaan dan koordinasi komponen SIHREN, SOPHI dan InPULS dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dari Kementerian/Lembaga, Tim Koordinasi Internal Kemenkes, dan *Project Management Unit* (PMU). Di lingkungan Kemenkes, Focal Point telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Sekretariat Jenderal No. KS.02.03/A/32589/2023 tanggal 24 Juli 2023 (salinan Surat Keputusan ada pada Lampiran F).

Pada tahap ini, SEP belum mencantumkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan SEP. Alokasi anggaran akan disediakan sebagai bagian dari SEP yang diperbarui selama pelaksanaan proyek. Tabel di bawah ini memberikan contoh elemen-elemen yang dapat dianggarkan untuk implementasi SEP, untuk diperbarui sesuai kebutuhan. Sumber anggaran akan dialokasikan dari komponen anggaran Manajemen Proyek pada SOPHI, SIHREN dan InPULS.

Tabel 1. Contoh Elemen yang Dapat Dianggarkan untuk Implementasi SEP

Kategori Anggaran	Kuantitas	Biaya Satuan	Waktu/Tahun	Biaya total	Informasi
1. Perkiraan gaji staf* dan biaya terkait					
Spesialis Lingkungan dan Sosial di setiap PMU					
Spesialis Lingkungan dan Sosial Senior di CPMU					
2. Kegiatan Pelibatan					

Rapat (Koordinasi, Teknis)					
Lokakarya					
Penjangkauan					
3. Kampanye komunikasi					
Papan pengumuman					
Pemaparan informasi					
TOTAL ANGGARAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN:					

7.2 Fungsi dan tanggung jawab pengelola

Pada tahap persiapan, Focal Point yang bertanggung jawab atas penyusunan program pelibatan pemangku kepentingan adalah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan (Ditjen Yankes) untuk komponen SIHREN dan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat (Ditjen Kesmas) untuk komponen SOPHI dan InPULS. Salinan Surat Keputusan terdapat pada Lampiran laporan ini. Sementara pada tahap implementasi, spesialis Lingkungan dan Sosial dari PMU akan ditunjuk untuk bertanggung jawab atas kegiatan pelibatan pemangku kepentingan.

Kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan didokumentasikan melalui saluran tertentu yang akan ditentukan, misalnya, melalui situs web Proyek, papan buletin, atau platform online lainnya. Seiring berjalannya proyek, informasi terbaru dari tahap implementasi termasuk catatan dari kegiatan pelibatan pemangku kepentingan (seperti rencana yang teracantum pada Lampiran E) akan diperbarui pada SEP ini.

8. Mekanisme Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Mechanism,* GRM)

Tujuan utama GRM adalah membantu menyelesaikan keluhan dan pengaduan secara tepat waktu, efektif, dan efisien sehingga dapat memuaskan semua pihak yang terlibat.

8.1 Deskripsi GRM

Pada tahap awal Proyek, Kemenkes akan memanfaatkan saluran GRM yang sudah ada. Di tingkat nasional, keluhan ini akan disalurkan melalui 'Halo Kemkes' yang dapat dihubungi melalui nomor telepon (*hotline*: 1500-567), pesan teks (SMS 081281562620 atau Fax (021) 5223002, 52921669), atau melalui email (kontak@kemkes.go.id) dan juga melalui saluran 'LAPOR' di website (https://www.lapor.go.id/) yang akan dikelola oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik dari Kemenkes. Di tingkat fasilitas, seperti rumah sakit, puskesmas, dan labkesmas, GRM akan memanfaatkan saluran yang sudah tersedia di fasilitas tersebut. Keluhan akan diterima di tingkat fasilitas dan kemudian akan dilaporkan ke dinas kesehatan setempat terkait. Sistem GRM yang ada sudah mencakup mekanisme pencatatan dan pemantauan keluhan. Keluhan terkait permasalahan lingkungan dan sosial yang diterima untuk proyek, akan disampaikan secara berkala sebagai bagian dari laporan proyek.

Deskripsi mengenai diagram alir dari saluran penanganan keluhan, yaitu melalui nomor telepon dan email Halo Kemkes, dan tatap muka langsung, terdapat pada Lampiran G. Diagram alir tersebut menjelaskan pihak penerima keluhan/masukan, bagaimana keluhan diarahkan sampai dapat terselesaikan, pihak-pihak yang bertanggung jawab dan jangka waktu untuk tanggapan di setiap saluran

pengaduan. GRM ini akan digunakan oleh Proyek, dengan mekanisme spesifik untuk Proyek yang akan dicantumkan dalam Manual Operasional Proyek sebagaimana diperlukan dan proporsional dengan potensi risiko dan dampak Proyek.

Informasi mengenai saluran GRM akan diinformasikan secara publik, termasuk prosedur penyelesaiannya, melalui konsultasi publik, atau dipasang pada papan notifikasi yang akan disediakan di fasilitas kesehatan.

9. Pemantauan dan Pelaporan

Pemantauan terhadap kegiatan implementasi SEP akan dilakukan secara berkelanjutan untuk meninjau efektivitas strategi pelibatan yang telah dilakukan dan memberikan masukan untuk kegiatan pelibatan selanjutnya. Spesialis lingkungan dan sosial yang akan direkrut oleh PMU (Dirjen Yankes dan Dirjen Kesmas) dan spesialis senior lingkungan dan sosial yang akan direkrut oleh CPMU (dibawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Kemenkes) akan bertanggung jawab atas pemantauan, memastikan penerapan SEP, dan memelihara catatan dan dokumentasi kegiatan pelibatan pemangku kepentingan.

Catatan pelaksanaan SEP ini akan mencakup informasi mengenai lokasi dan tanggal kegiatan, pendekatan yang diambil dalam pelibatan (misalnya pertemuan rutin/lokakarya/FGD/diskusi), informasi mengenai pemangku kepentingan yang terlibat, dan ringkasan umpan balik yang diterima dari kegiatan tersebut. Catatan dari pelaksanaan SEP akan dikumpulkan dalam dokumen proyek dan dilaporkan secara berkala sesuai dengan persyaratan ESCP dan laporan rutin kemajuan proyek.

Spesialis lingkungan dan sosial dari PMU berperan dalam memantau dan mendokumentasikan setiap komitmen atau tindakan yang disepakati selama konsultasi, termasuk amandemen akibat perubahan desain Proyek atau implementasi SEP. Hasil dari kegiatan pelibatan pemangku kepentingan akan dilaporkan kembali kepada pemangku kepentingan melalui saluran yang akan ditentukan, misalnya melalui situs web Proyek, papan buletin, atau platform online lainnya.

LAMPIRAN A IDENTIFIKASI DAN ANALISA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI, SIHREN DAN INPULS

TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: SOPHI

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
PENERIMA DAMPAK		
Puskesmas	Puskesmas (meliputi: PJ-KB, PK-UKP, PJ-KIA, PJ-Gizi, PJ-Imunisasi, PJ-Farmasi)	Menerima, mengoperasikan, dan memelihara alat kesehatan, termasuk mengelola limbah medis
Jejaring Puskesmas	Poskesdes	Menerima, mengoperasikan, dan memelihara alat kesehatan, termasuk mengelola limbah medis
	Pustu	
	Posyandu	
Vendor dan penyedia layanan	Penyedia alat	Melaksanakan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan proyek, dan pemeliharaan alkes hingga kurun waktu yang disepakati
	Distributor	
	Ekspedisi (termasuk subkontraktor dari vendor)	Melaksanakan pengiriman alat kesehatan ke lokasi proyek
	Perusahaan pengelolaan limbah	Menyediakan jasa pengelola limbah medis sebagai jejaring pengelolaan limbah dari fasilitas kesehatan
Masyarakat / Pasien	Pasien	Menerima manfaat penggunaan alat kesehatan melalui layanan di fasilitas kesehatan
	Ibu dan anak	
	Lansia	
	Penyandang disabilitas	
	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	
	Masyarakat adat	
Konsultan	Konsultan	Menentukan jenis dan spesifikasi alat kesehatan yang diperlukan dalam perencanaan proyek
Kader	Kader	- Menggunakan alat kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat - Melaksanakan sistem informasi kesehatan, termasuk fungsi pelaporan
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi Badan Akreditasi	- Melaksanakan uji coba dan keberfungsian alat kesehatan - Mendukung kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
Rumah Sakit Rujukan	Rumah Sakit Rujukan	Melaksanakan fungsi sistem rujukan layanan kesehatan dan pengelolaan limbah medis, termasuk dalam pengiriman sampel
PIHAK BERKEPENTINGAN		
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Prov, Kota/Kab)	Berkoordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan distribusi dan instalasi alat kesehatan sesuai kewenanganan masing-masing
	Kepala Desa/Lurah	Berkoordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan distribusi dan instalasi alat kesehatan di di puskesmas, pustu dan posyandu di tingkat desa/kelurahan
Lembaga Internasional	WB	Merumuskan, supervisi, dan mengawasi pelaksanaan dokumen proyek, khususnya dalam konteks penanganan dampak lingkungan dan sosial
	ADB	
	AIIB	
	WHO (Konsultan Alkes)	Membantu ketersediaan anggaran dan jasa konsultansi guna mendukung utilisasi alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pencapaian program
LSM	LSM	Menampung, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memantau pelaksanaan proyek sebagai bentuk pengawasan aspek sosial (moral hazard)
Media	Media	Menyebarluaskan informasi, melakukan fungsi pengawasan, serta menampung, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan proyek
Organisasi Masyarakat	Organisasi Keagamaan	Pihak yang dapat memberikan dukungan terhadap Proyek, melalui penyampaian informasi tentang manfaat proyek bagi masyarakat

TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: SIHREN

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
PENERIMA DAMPAK		
Rumah Sakit	RS Rujukan	- Menerima alat-alat kesehatan terbaru dan sesuai kebutuhan
	RS Pengampu (Nasional, Regional, Diampu)	
	UPT Vertikal	
	RSUD (Prov, Kota/Kab)	
Vendor/ Industri	Vendor Penyedia Alkes	- Menyediakan alat kesehatan untuk program - Melaksanakan kegiatan distribusi, instalasi, dan pemeliharaan alat kesehatan
	Industri Alkes	
Masyarakat / Pasien	Pasien	Penerima manfaat penggunaan alat kesehatan yang bersifat diagnostik, terapeutik maupun rehabilitatif (sebagai pasien)
	Perempuan dan anak	
	Masyarakat umum	
	Masyarakat sekitar RS	
	Masyarakat adat, kepala suku	
	Tokoh masyarakat	
	Tokoh agama	
Konsultan	Konsultan Badan Akreditasi	- Menentukan jenis dan spesifikasi alat kesehatan yang diperlukan dalam perencanaan proyek - Menilai dan/atau mensertifikasi alat kesehatan
Tenaga Kesehatan	Pimpinan RS	- Menggunakan dan mengoperasikan alat kesehatan - Pimpinan RS: komitmen penerapan pengurangan emisi karbon; MoU dengan pihak ketiga pengelolaan limbah - Pengelola program kesling RS: perencanaan, pengelolaan, dan monev terhadap limbah yang ditimbulkan
	Pengelola program kesling di RS	
	Komite/unit pengaduan di RS	
	Komite/unit keselamatan kerja	
	Kesling dan PPI RS	
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Prov, Kota/Kab)	Melakukan penempatan SDM medis/tenaga kesehatan ke RS penerima alat kesehatan
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	- Menyediakan tenaga spesialis/teknis (PPR fisikawan medik/radiografer) - Melaksanakan program peningkatan layanan (membuka pusat pendidikan)
PIHAK BERKEPENTINGAN		

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
Badan Legislatif	DPR	Persetujuan program/kegiatan penguatan jejaring pelayanan kesehatan rujukan layanan unggulan 9 prioritas masalah kesehatan, persetujuan pengalokasian anggaran program/kegiatan, pengawasan pelaksanaan program/kegiatan dan pengawasan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
	DPRD	
Kementerian/Lembaga lain	Bappenas	- Berpartisipasi dalam membuat strategi pelaksanaan program - Kemenperin & Kemendag: berkoordinasi menyusun daftar alat kesehatan rendah emisi karbon dan non-merkuri - Kemen PUPR: menyediakan sertifikasi bangunan RS/Bunker yang akan direhabilitasi; membantu melakukan analisis biaya komponen pembangunan ruangan/gedung atas penempatan alat kesehatan yang memerlukan ruangan khusus - LKPP: mengawal proses pengadaan sesuai peraturan yang berlaku - Bapeten: Melaksanakan commissioning dan perizinan terhadap ruangan dan alat kesehatan radiasi pengion
	Kemenperin	
	Kemendag	
	KemenPUPR	
	LKPP	
	Bapeten	
Pemerintah Daerah	Pejabat daerah	- Menjadi penerima hibah dan memberikan informasi kepada pemerintah pusat mengenai kebutuhan hibah - Menyediakan anggaran daerah untuk keberlangsungan proyek; memfasilitasi penyediaan/bantuan penyediaan dana operasional dan pemeliharan - Mengelola anggaran kesehatan daerah - Menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi program/kegiatan yang mendukung layanan unggulan (KJSU) - Memfasilitasi perizinan lainnya (kredensialing tenaga kesehatan, izin operasional RS) - Berkomitmen dalam penyediaan sarpras lainnya
	Bappeda	
	Dinas PU	

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
	Pemerintah Desa/Kelurahan RS setempat	- Dinas PU: Menganalisis biaya sarpras penunjang - Bertanggung jawab atau komitmen untuk menghimpun usulan kebutuhan alat kesehatan dari daerah - Bersinergi dengan pemerintah pusat dalam membuat strategi pelaksanaan program
Lembaga Internasional	WB	Pemberi dana proyek pengadaan
	IsDB	
	AIIB	
Asosiasi	Gakeslab	Mendorong percepatan penyediaan alat kesehatan impor, pengaturan penyediaan teknisi untuk pelatihan alat di RS
	Aspaki	
LSM	Yayasan/LSM/Paguyuban penyakit tertentu	- Membantu transparansi distribusi - Media/komunikasi/advokasi dampak positif proyek kepada masyarakat
Media	Media	Menjadi media informasi kepada masyarakat luas danmedia/komunikasi/advokasi dampak positif proyek kepada masyarakat

TABEL IDENTIFIKASI PEMANGKU KEPENTINGAN: InPULS

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
PENERIMA DAMPAK		
Laboratorium Kesehatan	Labkesmas (Tier 2 dan 3)	Menerima, mengoperasikan, dan memelihara alat kesehatan, termasuk mengelola limbah medis
	Labkesda (Tier 4 dan 5)	
Penyedia dan vendor	Principal peralatan Labkesmas	Melakukan sosialisasi layanan purna jual alat kesehatan laboratorium kesehatan
	Penyedia alat	Melaksanakan pengadaan alat kesehatan yang dibutuhkan proyek, dan pemeliharaan alkes hingga kurun waktu yang disepakati
	Distributor	
	Ekspedisi (termasuk dari subkontraktor dan vendor)	Melaksanakan pengiriman alat kesehatan ke lokasi proyek
	Pengirim sampel khusus	Melaksanakan fungsi layanan pengiriman sampel khusus dari/ke laboratorium kesehatan
	Perusahaan pengelolaan limbah	Menyediakan jasa pengelola limbah medis sebagai jejaring pengelolaan limbah dari laboratorium kesehatan
Masyarakat	Masyarakat	Menerima manfaat penggunaan alat kesehatan melalui layanan di Labkesmas
Konsultan	Konsultan Penilai *biosafety* laboratorium, badan penyedia sertifikat dan akreditasi	Menetapkan jenis dan spesifikasi alat kesehatan yang dibutuhkan dalam perencanaan proyek Menilai dan/atau mensertifikasi alat medis
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	- Melaksanakan uji coba dan keberfungsian alat kesehatan - Mendukung kegiatan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
Sistem Rujukan	Puskesmas	Melaksanakan fungsi layanan kesehatan di Tier 1, yang bila tidak mampu, dapat merujuk kepada laboratorium kesehatan Tier 2 dan 3
	Laboratorium KKP	Melaksanakan fungsi layanan kesehatan secara khusus, yang bila tidak mampu, dapat merujuk kepada laboratorium kesehatan Tier 4 dan 5

Kategori	Pemangku Kepentingan	Peran Terkait Proyek
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Provinsi, Kota/Kab)	- Berkoordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan distribusi dan instalasi alat kesehatan sesuai kewenangannnya - Menyiapkan lahan untuk pembangunan laboratorium kesehatan jika belum tersedia - Instansi pemerintah untuk penerbitan perijinan, persetujuan dokumen lingkungan atau adendumnya
PIHAK BERKEPENTINGAN		
Jejaring Labkesmas	Rumah Sakit	- Melaksanakan fungsi sistem rujukan layanan kesehatan dan pengelolaan limbah medis dari/ke laboratorium kesehatan - Bekerja sama dan berkoordinasi terkait pemeriksaan, pembagian data-informasi, dan SDM sebagai mitra/jejaring laboratorium kesehatan
	Laboratorium Perguruan Tinggi	
	Laboratorium lain (K/L lain dan swasta)	
Lembaga Internasional	WB	Merumuskan, supervisi, dan mengawasi pelaksanaan dokumen proyek, khususnya dalam konteks penanganan dampak lingkungan dan sosial
	ADB	
	WHO (Konsultan Alkes)	Membantu ketersediaan anggaran dan jasa konsultansi guna mendukung utilisasi alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pencapaian program
LSM	LSM	Menampung, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memantau pelaksanaan proyek sebagai bentuk pengawasan aspek sosial (moral hazard)
Media	Media	Menyebarluaskan informasi, melakukan fungsi pengawasan, serta menampung, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan proyek
Organisasi Masyarakat	Organisasi Keagamaan	Pihak yang dapat memberikan dukungan terhadap Proyek, melalui penyampaian informasi tentang manfaat proyek bagi masyarakat

LAMPIRAN B RINGKASAN KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TELAH DILAKUKAN

Ringkasan Kegiatan Pelibatan Pemangku Kepentingan yang telah Dilakukan Kemenkes untuk Komponen-Komponen Proyek

No.	Pemangku Kepentingan	Ringkasan Informasi Kegiatan Pelibatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Kolegium Ilmu Kesehatan Anak	Diskusi kebutuhan SDM Kesehatan dalam pelayanan prioritas, diskusi upaya pemenuhan kebutuhan SDM di Rumah Sakit jejaring pelayanan prioritas	Mei 2023
2.	Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PERNEFRI)	Diskusi peningkatan layanan Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)	29 Juni 2023
3.	RSUPN Cipto Mangunkusumo	Koordinator pengampuan uronefrologi mulai dari penentuan SDM, alkes dan jenis pelayanan setiap strata rumah sakit. Melakukan pengampuan ke seluruh rumah sakit jejaring baik langsung maupun pendelegasian ke pengampu regional	2x/bulan, sejak 2022
4.	RS Pusat Kanker Nasional Dharmais	Koordinator pengampuan Kanker mulai dari penentuan SDM, alkes dan jenis pelayanan setiap strata rumah sakit. Melakukan pengampuan ke seluruh rumah sakit jejaring baik langsung maupun pendelegasian ke pengampu regional	2x/bulan, sejak 2022
5.	RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita	Koordinator pengampuan kardiovaskuler mulai dari penentuan SDM, alkes dan jenis pelayanan setiap strata rumah sakit. Melakukan pengampuan ke seluruh rumah sakit jejaring baik langsung maupun pendelegasian ke pengampu regional	2x/bulan, sejak 2022
6.	RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono	Koordinator pengampuan stroke mulai dari penentuan SDM, alkes dan jenis pelayanan setiap strata rumah sakit. Melakukan pengampuan ke seluruh rumah sakit jejaring baik langsung maupun pendelegasian ke pengampu regional	2x/bulan, sejak 2022
7.	BAPETEN	Perizinan untuk peralatan dengan radiasi	Maret 2023 – saat ini
8.	BPJS Kesehatan	pembiayaan jasa layanan dari peralatan yang diadakan	Mei 2023
9.	Dinas Kesehatan	Pemantauan pelaksanaan kegiatan, izin operasional	Akhir Agustus dan September 2023 melalui kegiatan sosialisasi nasional
10.	Pemerintah Daerah	Ketersediaan anggaran kontribusi daerah untuk keberlangsungan proyek dan	31 Agustus dan September 2023 melalui kegiatan

No.	Pemangku Kepentingan	Ringkasan Informasi Kegiatan Pelibatan	Waktu Pelaksanaan
		sosialisasi tentang tranformasi sistem kesehatan	sosialisasi nasional
11.	Calon vendor penyediaan alat kesehatan	Metode procurement (e-catolog, NCB atau ICB), metode evaluasi (kriteria penilaian/harga dan kombinasi teknis), isu produk lokal, spesifikasi dan nilai dari volume alat keseahatan, milestone pengadaan	29 September 2023. Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan
12.	Konsultasi Publik untuk dokumen safeguard Lingkungan dan Sosial (ESMF, SEP dan ESCP)	Sosialisasi dan diskusi mengenai keseluruhan desain proyek, rencana kegiatan yang akan dilakukan dan dokumen safeguard lingkungan dan sosial (SEP ini, ESCP dan ESMF)	6 Oktober 2023, rapat daring melalui Zoom

Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi di tanggal 31 Agustus 2023.

LAMPIRAN C DOKUMENTASI KEGIATAN KONFERENSI VENDOR

NOTULEN
VENDOR CONFERENCE LOAN PROJECT
"Strengthening Indonesia Healthcare Referral Network (SIHREN),
Strengthening of Primary Healthcare In Indonesia (SOPHI)
Indonesia – Public Laboratory System Strengthening (InPULS)

Hari/tanggal kegiatan	:	Jumat, 29 September 2023
Tempat Kegiatan	:	Gedung Dhanapala Kemenkeu
Narasumber	:	Miss Satu Kahkonen Dr. Luky Afirman Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, M.A, Ph.D Zulvia Dwi Kurnaini, SE, M.Ec Bapak Andi dari Ditjen Yankes dr. Nida dari Ditjen Kesma Bapak Budi Permana World Bank Mr. Mike World Bank
Peserta Kegiatan	:	Peserta luring 322 Peserta daring 421 Panitia internal Kemenkes

SESSION I

1. Opening oleh MC
2. National Anthem : Indonesia Raya
3. Keynote Speech I : Miss Satu Kahkonen dari World Bank Country Director For Indonesia and Timor leste menyampaikan tujuan untuk mendukung peningkatan health care di Indonesia, strengthening Indonesia Healthcare
4. Keynote Speech II : Bapak Dr. Luky Afirman dari Director General of Budget Financing and risk management of the ministry of finance of the Republic Indonesia. menyampaikan skema pendanaan untuk peningkatan Kesehatan di Indonesia.
5. Keynote Speech III Bapak Kunta Wibawa Dasa Nugraha, SE, M.A, Ph.D Secretary General of Ministry Of Health of the Republic of Indonesia menyampaikan dan menyapa semua undangan. Pada sambutannya menyampaikan 6 pilar transformasi Kesehatan di Indonesia. Collaboration with Multilateral Development Bank (MDB)
6. Video SIHREN, SOPHI dan InPULS

SESSION II

Dibuka oleh MC, memberi pengumuman untuk undangan tidak mengambil video dan uload pada social media, mengundang Ibu Ana (Kabiro PBJ), Pak Andi dari Yankes Kemenkes, dan Ibu dr. Nida director public health manajemen :

PEMAPARAN

1. Ibu Ana menyapa para undangan dan terima kasih sudah hadir, menyampaikan tujuan Pemaparan Program
2. Bapak Andi, memberi salam, memberikan paparan mengenai program Kesehatan meliputi program ibu dan anak, penyakit kanker, serta program layanan Kesehatan lainnya. Menyampaikan lisf of equipment SIHREN, dengan KJSI, KIA penggunanaan alat disesuaikan pada fasilitas pelayanan Kesehatan tingkatan pratama, madya dan paripurna, terdapat 81 alat (terlampir).
3. Bu Ana menyampaikan list alat sudah terpublikasi pada website, tetapi ada list alat baru dari KIA setelah ini akan dibagi Kembali.

4. Ibu Nida dari Dirjen Kesmas menyampaikan daftar peralatan untuk keperluan SOPHI, alat ini diperlukan pada tingkat Pustu, untuk keperluan pada siklus hidup mulai dari bayi, balita, hingga lansia. Ada 77 item alat, untuk alat-alat kecil lainnya tidak diikutkan pada presentasi hari ini.
5. List untuk Inpuls 566 lab, 514 for tier 2, 38 for tier 3, 12 for tier 4, 2 for tier 5.
6. Ibu Ana menyampaikan pada list alat ini harus dipenuhi untuk meningkatkan layanan. Ada beberapa alat masih belum ada jumlah keperluan, tetapi jumlah akan diupdate Kembali, menyesuaikan dengan jumlah fasyankes. Pada level puskesmas dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, masih focus pada alat medis sebagai prioritas untuk pengadaan. Untuk equipment technical specification terdapat 10 tehnical spec/features,...
7. Ada beberapa fase 2024 – 2028, pada saaat awal equipment, celivery, installation, testing and commissioning, juga terdapat monitoring.
8. Kriteria fase terdapat kapasitas SDM, fasilitas, infrastructure untuk memasang alat medis tersebut kerjama dengan DAK, Bappenas, Kemenkeu, juga pasokan listrik, terutama untuk beberapa bagian wilayah Indonesia.
9. Kuesioner sudah dibagikan terdapat 164 respon (43 OEM, 121 Distributor/sales agent; local 136, international 28), terima kasih kepada vendor yang sudah mendukung mengisi kuesioner vendor, untuk diketahui oleh para vendor pada tahun pertama kesediaan lokasi dikonfirmasi oleh Pak Andi, untuk memastikasi lokasi, karena dari vendor sudah siap untuk menyediakan alat.
10. Ibu Ana menyampaikan respon vendor 89% mampu untuk mensuplai kepada Pustu, Puskesmas dan Lab dengan jumlah besar, 77% periode 5 sampi 7 tahun siap untuk menyiapkan barang consumable/BHP tersedia, 95% siap memberikan pemeliharaan komprehensif dan service. Biasanya pemeliharaan menghadapi kendala untuk garansi, paling tidak garansi diberikan 5 tahun. Bahkan perlu dan mampu melayani sampai fasyankes daerah terpencil. Vendor mampu memberikan layanan 2 – 3 hari untuk merespon permintaan, 84% mampu menyediakan gratis software sampai 5 tahun, 95 % mampu menyediakan sparepart 8 – 10 tahun untuk menyediakan , 90% memiliki pengalaman untuk melakukan penawaran, 94% fleksibilitas pada kuantitas dan pengantaran. Sesuai peraturan apabila perlu alat maka harus diajukan oleh pemda dituangkan dalam kontrak paling tidak 5 tahun.
11. Ibu Ana : akan dilakukan Q n A pada diskusi mengenai project ini silakan

DISKUSI

12. Pertanyaan dari Elis dari stake holder alat medis, bersyukur bisa hadir dan mengetahui project ini. Stakeholder kami adalah untuk meningkatkan layanan medis, alkes, lab, kami ingin tahu arah kelanjutan dari project ini yang sudah direncanakan pemerintah untuk berkelanjutan sampai jangka Panjang, terutama untuk bisa mencapai daerah terpencil. Untuk lab perlu dilakukan kalibrasi terhadap alat, bagaimana menyakinkan loan untuk bisa yakin terhadap keberlangsungan program ini.
13. Tanggapan Bu Ana, terima kasih untuk pertanyaan
14. Dijawab oleh Pak Andi, dari sisi Ibu sebagai auditor bagaimana pertanyaan ini berhubungan dengan outcome dari project ini. SIHREN ini berhubungan dengan layanan Kesehatan yang berhubungan dengan berbagai jenis penyakit. Hubungan dengan angka dari RS yang menerima manfaat mulai dari tingkatan RS. Kalau dilihat dari skema transformasi Kesehatan makan akan berhubungan dengan system referral, maka SIHREN masuk dalam penyediaan KJSU, KJIA. Ada kombinasi dan harmonisasi skema, misal penyediaan alat, SDM, dan spesialiassai dan kapasitas pemda untuk meyiapkan infrastruktrunya dan sistem Kesehatan.
15. Ibu Nida, kami mulai melengkapi alat lab pada tingkat primer, sehingga pada tingkat primer mampu melakukan pemeriksaan lab, proyek ini berlangsung lebih dari 1 tahun.
16. Ibu Ana, proyek ini besar, terima kasih kepada pertanyaan ini kaena mengingatkan untuk merapkan tata Kelola baik, kberlanjutan proyek ini masih didiskusikan segera untuk finalisasi masuk dalam perencanaan 5 tahunan sehingga masuk terus pada berbagai tahapan Pembangunan tingkat pemda. Untuk tetap menjaga kolaborasi dengan pemda, selain menjaga komitmen MDB, juga kolaborasi dengan Pemda. Peran vendor serta auditor BPK dan BPKP untuk bisa mengawasi mulai pada tahap perencanaan.

17. Pertanyaan dari bapak Manish, kami sudah bekerja 1 dekade, saya melihat Indonesia memberikan dukungan pada fasyankes, apa rencana kedepan terutama mengenai TKDN, untuk produk internasional tentu berbeda dengan vendor local, lalu ada bidding 300 unit, sama seperti ekatalog pemda bisa memilih berbagai produk, apakah pemerintah focus pada TKDN, apakah pemda ada berfokus pada salah satu vendor atau multiple vendor.
18. Ibu Ana, saya akan simpan pertanyaan dari Pak Manish untuk sesi 3
19. Pertanyaan Bapak Joseph, dari 27 tahun punya pabrik manufaktur di Batam, investasi pada alkes. Kami membuat BHP, peralatan safety sekali pakai. Alat kami untuk menjaga keselamatan nakes dalam apakah pemerintah ada kementerian lain yang menangani safety nakes, karena perihal safety nakes dalam bekerja menggunakan jarum suntik harus diperhatikan oleh pemerintah
20. Jawaban Bu Ana, terimakasih atas concern terutama pada safety nakes, hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah karena safety nakes dalam bekerja harus menjadi perhatian.
21. Ibu Ana menutup sesi 2 dengan mengucapakan terima kasih, mengingatkan bahwa ini adalah tahapan awal dari langkah Panjang.
22. MC mengucapkan terima kasih kepada narasumber, serta mengajakan foto bersama. Memasuki sesi 3

SESSION III

PEMAPARAN

1. Procurement planning and strategy, Ibu Ana menyampaikan untuk sesi 3 jam 13 dilanjutkan sekarang. Dan mengajak bapak Budi Permana dan Bapak Mike.
2. Bapak Budi Permana senior procurement world bank memperkenalkan diri
3. Bapak Mike dari world bank memperkenalkan diri
4. Pada sesi ini disampaikan materi Oleh Bu Ana, Indonesia HSS Project terbagi pada program SIHREN, SOPHI, InPULS (WB+AIIB, parallel) untuk 3 project ini mengikut panduan dari WB, tidak diperlukan TKDN dalam project ini.
5. Hanya bidder yang lolos yang masuk dalam proses ini, yang tidak memenuhi syarat mengikuti panduan dari WB, AIIB, ADB, untuk yang blacklist tidak memenuhi syarat
6. Ini akan menjadi pengadaan kompetitif terbuka internasional. Dokumen standar pengadaan ada pada website,
7. Terdapat juga national open competitive
8. Kontak adalah bagian yang perlu diperhatikan, harus diisi spesifikasi dengan detail, untuk pembayaran akan diputuskan nanti, apakah pembayaran dilakukan didepan, atau beberapa tahap, hal ini akan tertuang dalam kontrak.
9. Peran pihak terkait : MOH sebagai badan pelaksana terlibat dalam semua tahap pengadaan, mendokumentasikan semua dokumen, , MDBs sebagai supevisi dari project, ECRI konsultan.
10. Ibu Ana menyampaikan timeline for first batch (terlampir). Pada tahapan ini mohon bisa diperhatikan sehingga bisa diikuti dengan benar, kepada Pak Budi dan Pak Mike, silakan ditambahkan
11. Bapak Budi, menyampaian regulasi pengadaan mengikuti panduan dari MBD, setiap vendor bisa ikut berpartisipasi, kita juga mengumpulkan data dengan pendekatan pasar, setiap pasar internasional dan local diberikan kesempatan sama, selama syarat terpenuhi. Banyak peluang bagi penyedia local untu berpastisipasi.
12. Bapak Mike, mengenai regulasi WB, tersedia pada website WB, silakan vendor bisa akses website WB. Project ini besar karena banyak pemangku kepentingan terlibat.
13. Ibu Ana, sekian dari kami, silakan untuk pertanyaan dan diskusi.

DISKUSI

1. Dari Ibu Chloe, kami adalah bidder dari luar, apakah ada persyaratan local?
2. Dijawab Ibu Ana, tidak ada. Sesuai panduan WB saja tidak ada syarat diluar itu.

3. Pertanyaan dari zoom, apakah untuk memenuhi alat-alat tersebut, hanya perlu dari satu vendor saja
4. Jawaban Ibu Ana, sesuai kebutuhan, bisa jadi dari banyak vendor
5. Pertanyaan zoom, apakah bidding dalam bentuk ekatalog
6. Jawaban Ibu Ana, bidding international dilakukan.
7. Ibu Ana berikan satu kesempatan untuk pertanyaan lagi
8. Pertanyaan Bapak Setiawan, dari manufaktur local, bidding terbuka international juga apakah ada item harus didaftarkan local
9. Jawaban Ibu Ana, adalah wajib untuk mendaftarkan local, kita akan cek regulasi akan diinformasikan Kembali.
10. Pertanyaan Ibu Janice, apakah ada mekanisme tersedia untuk melihat spesifikasi tender
11. Jawaban Bapak Mike Ya ada mengikuti regulasi WB dan ada annex pada dokumen detil pengadaan WB, tambahan dari Ibu Ana, untuk spesifikasi teknis bisa ditambahkan pada pertemuan spesifikasi teknis untuk bisa diperhatikan, tambahan dari Pak Budi untuk hal spesifikasi dan klarifikasi bisa diikuti pertemuan pre-bidding, sehingga bisa meninjau klarifikasi dari vendor
12. Pertanyaan dari Mens Diagnostic, pada saat tender dibuka akan diketahui jumlah dan spesifikasi, apakah vendor akan diberitahukan tidak hanya jumlah, apakah ada informasi tambahan lainnya.
13. Jawaban Ibu Ana dan pak Budi, ya tentu akan dijelaskan spesifikasi Teknis dan cakupan pelayanannya
14. Pertanyaan dari zoom meeting, ekatalog atua metode lain.
15. Jawaban, melalui bidding, tahapan akan dimulai pada akhir tahun ini
16. Pertanyaan dari zoom meeting, apa kriteria untuk bidding?
17. Jawaban Ibu Ana, untuk kriteria akan dilakukan pencatuman pada dokumen pengadaan
18. Pertanyaan, apa kriteria untuk menang bidding
19. Jawaban Ibu Ana, tidak hanya melihat harga rendah, banyak factor kriteria mulai dari harga, kualitas dan keberlanjutan.
20. Closing oleh Bu Ana pada session 3.

Tindak lanjut

Memperhatikan rangkaian tahapan bidding selanjutnya yang akan membahas mengenai spesifikasi Teknis dan kriteria bidding, mohon bisa tetap mengikuti setiap rangkaian tahapan pengadaan, sehingga bisa berjalan sesuai panduan MDB, semua dokumen bisa terdokumentasikan.

Koordinator Acara,

Agung Qoriah,SH, MM
NIP 197302161992032001

Notulis,

Dwirina Hervilia
NIP 198408062010122002

Mengetahui
Kepala Biro,

Zulvia Dwi Kurnaini, SE, M.Ec
NIP 197407121998032001

Dokumentasi Foto Kegiatan Konferensi Vendor di tanggal 29 September 2023.

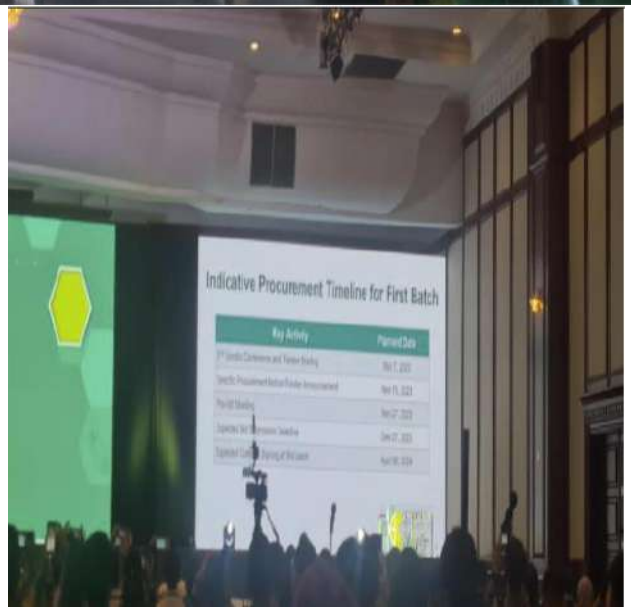

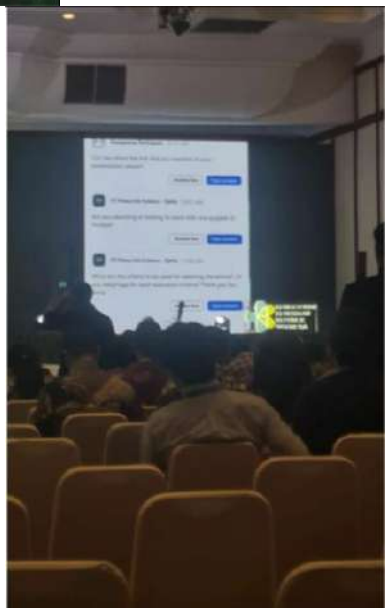

LAMPIRAN D DOKUMENTASI KONSULTASI PUBLIK UNTUK PENGUNGKAPAN DOKUMEN PROYEK DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

- Tanggal dan Waktu : Jumat, 6 Oktober 2023 14.30 – 12.00 WIB
- Media : Webinar Zoom
- Peserta : 180 peserta webinar

Peserta	Notulensi
Pemerintah Pusat: Kemenkes, Bappenas, Bapeten Pemerintah Daerah: Dinkes Kab. Sijunjung, Dinkes Kab. Gorontalo Utara, Dinkes Kab. Belitung, Dinkes Kota Cirebon, Dinkes Kota Bukittinggi, Dinkes Prov. Riau, Dinkes Kab. Siak, Dinkes Kab. Kaimana, Dinkes Kota Sukabumi, Dinkes Prov Kalimantan Timur, Dinkes Kab. Pangandaran, Dinkes Kab. Pasuruan, Dinkes Kota Depok, Dinkes Kab. Lumajang, Dinkes Kab. Purwakarta, Dinkes Kab. Pati, Dinkes Kab. Tangerang, Dinkes Kab. Kolaka, Dinkes Kab. Prabumulih, Dinkes Kab. Magetan, Dinkes Prov. DKI Jakarta, Dinkes Kab. Minahasa Utara, Dinkes Kab. Aceh Tenggara, Dinkes Kota Tangerang Selatan, Dinkes Prov. Jawa Barat, Dinkes Kota Cirebon, Dinkes Kab. Cilacap, Dinkes Kota Tual, Dinkes Kab. Bone, Dinkes Kab. Batang, Dinkes Kab. Magelang, Dinkes Prov. Sulawesi Tengah, Dinkes Kab. Probolinggo, Dinkes Kota Balikpapan, Dinkes Kota Jakarta Utara, Dinkes Kab. Poso, ASLABKESDA Indonesia, Gakeslab, PT Gebang Surya Harapan, PP HAKLI, KGTK, ASPAKI, Pusat Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (PKKGTK), PDS PatKLIn, PT Dos Ni Roha, FIND	**Pemaparan Materi** 1. **Latar Belakang Proyek**. Tujuan Proyek untuk meningkatkan akses ke layanan kesehatan dan menurunkan tingkat kematian di Indonesia melalui pengadaan dan distribusi alat kesehatan secara merata. 2. **Pilar transformasi kesehatan.** Aktivitas proyek akan bertujuan untuk mentransformasikan (1) layanan kesehatan primer; (2) layanan rujukan; (3) sistem ketahanan kesehatan; (4) sistem pembiayaan kesehatan; (5) SDM kesehatan; (6) teknologi kesehatan 3. **Kegiatan proyek dibagi menjadi 3:** (1) SOPHI; (2) InPULS; (3) SIHREN. 4. **SOPHI.** Lingkup kegiatan SOPHI termasuk pengadaan 196 jenis peralatan untuk klinik di daerah (puskesmas, pustu, posyandu) 5. **InPULS.** Lingkup kegiatan InPULS mencakup pengadaan 128 jenis peralatan untuk laboratorium kesehatan tingkat 2-5 6. **SIHREN.** Lingkup kegiatan SIHREN mencakup pengadaan 33 jenis peralatan untuk layanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uro-Nefrologi di Rumah Sakit 7. **Tata Waktu Proyek.** Proyek akan berlangsung di 2024 sampai dengan 2028. 8. **Potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosial** terkait proyek antara lain limbah medis, kebakaran dan kecelakaan dari pengoperasian alat, peningkatan emisi GRK, risiko K3 dan kekerasan berbasis gender 9. **Dokumen ESMF.** Secara umum, mengidentifikasi potensi risiko dan dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan kegiatan SOPHI, SIHREN, dan InPULS dan upaya mitigasinya. Kemenkes menekankan pentingnya bagi Fasyankes untuk memperhatikan pengelolaan lingkungan dan sosial 10. **Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan.** Mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan proyek dan memastikan inklusivitas dan transparansi kegiatan proyek. Tambahan informasi terkait pelibatan dengan vendor yang akan dilakukan selama 3-4 tahun dari pelaksanaan proyek. Kemenkes meminta masukan dari Puskesmas dan Labkesda untuk optimalisasi peralatan medis dan pemberian manfaat bagi masyarakat. 11. **Mekanisme Penanganan Keluhan dan Umpan Balik.** Kemenkes telah menyiapkan saluran dan mekanisme untuk penyampaian keluhan (melalui Halo Kemkes dan LAPOR) yang dapat dikomunikasikan ke masyarakat atau pihak yang terlibat atau pemangku kepentingan selama proses pelaksanaan proyek. 12. **Komitmen Lingkungan dan Sosial.** Dokumen ESCP mencantumkan komitmen Kemenkes dalam mengelola risiko lingkungan dan sosial 13. **Tautan/link ke dokumen draf ESCP, ESMF dan SEP** untuk masukan para pemangku kepentingan **Ringkasan dari Sesi Tanya Jawab dan Diskusi** 1. Beberapa laboratorium kesehatan sudah memiliki peralatan kesehatan yang memadai namun membutuhkan dana untuk membeli reagen dan barang habis pakai untuk mengoperasikan peralatan dan untuk kalibrasi peralatan 2. Peran vendor dalam hubungannya dengan dokumen ESCP, ESMF dan SEP dan jika ada aspek spesifik yang perlu diperhatikan oleh vendor 3. Kegiatan projek harus disinergikan dengan program kesehatan lainnya atau kolaborasi sektoral untuk menggunakan peralatan yang akan digunakan di Labkesmas 4. Potensi resiko terjadinya penyakit menular dari operasional peralatan untuk dipantau juga di area publik 5. Vendor yang sudah menerima sertifikasi terkait Cara Produksi Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB) dan Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB) akan perlu mengelola statusnya dan memastikan kualitas produk memenuhi standar nasional (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14/2021)

	6. Meminta SOP untuk penggunaan peralatan dan MSDS untuk reagen dan material lainnya yang akan digunakan untuk peralatan, untuk meminimalisir resiko
	Langkah Selanjutnya
	1. Dokumen lingkungan dan sosial yang relevan akan disosialisasikan ke penerima manfaat proyek selama proyek berjalan

Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik di tanggal 6 Oktober 2023.

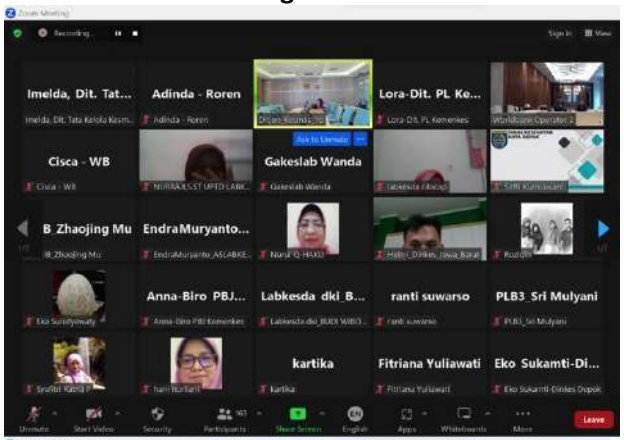

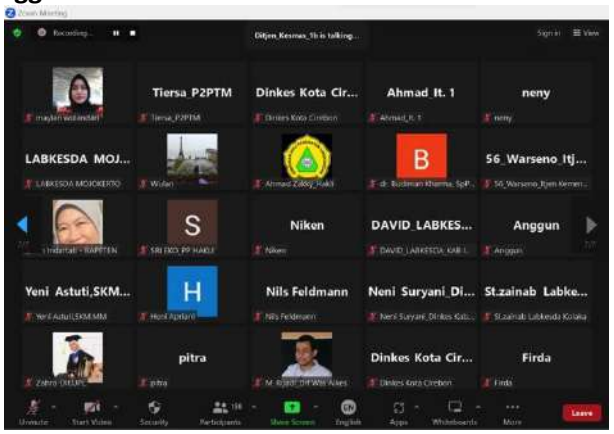

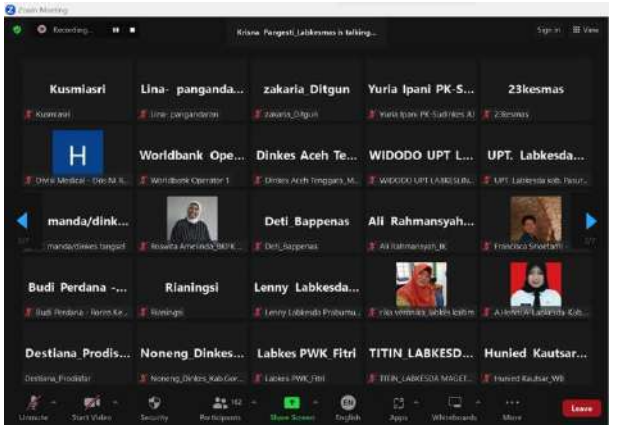

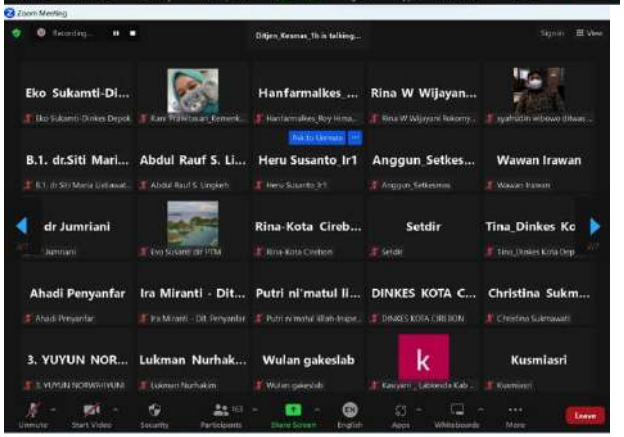

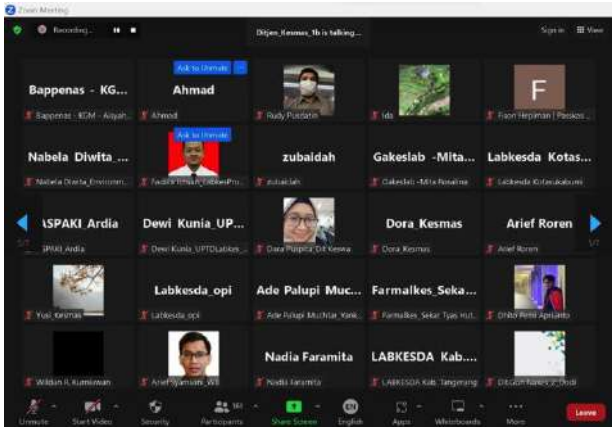

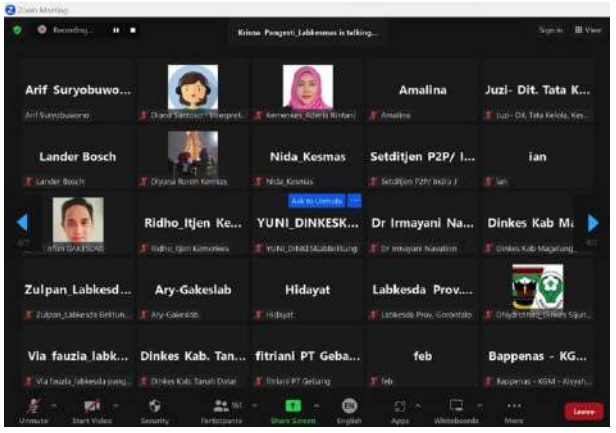

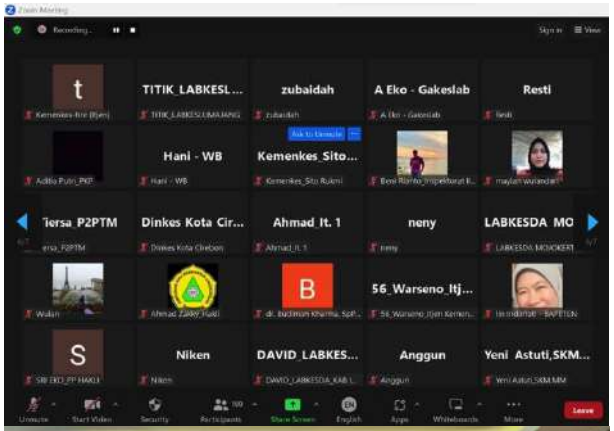
TITIK_LABKESL...
zubaidah
A Eko - Gakeslab
Resti
Hani - WB
Kemenkes_Sito...
Tersa_P2PTM
Dinkes Kota Cir...
Ahmad_It. 1
neny
LABKESDA_MO
56_Warseno_Itj...
Niken
DAVID_LABKES...
Anggun
Yeni Astuti,SKM...

DAFTAR ISI
• Latar Belakang Proyek & Gambaran Umum Proyek
• Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF)
▪ Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (SEP)
• Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP)

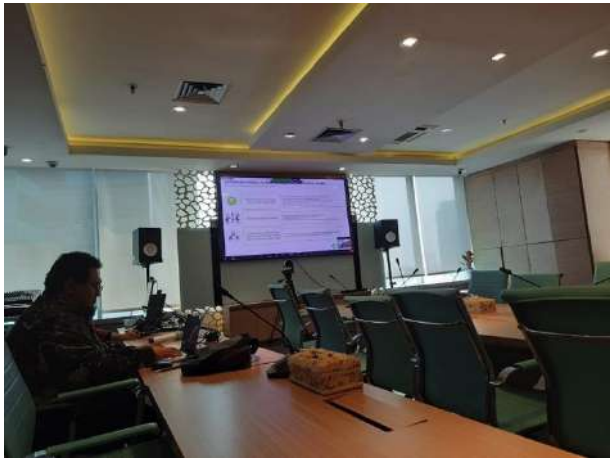

Recording
NURRAJI,S.ST UPTD LABKESDA KAB SIJUNJUNG

LAMPIRAN E RENCANA PROGRAM PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI, SIHREN DAN INPULS

TABEL RINGKASAN DARI RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SOPHI

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
PENERIMA DAMPAK						
Puskesmas	Puskesmas (meliputi: PJ-KB, PK-UKP, PJ-KIA, PJ-Gizi, PJ-Imunisasi, PJ-Farmasi)	- Persiapan dan perencanaan instalasi dan pengoperasian alat kesehatan, termasuk rehabilitasi fasilitas kesehatan (dokumen proyek) - Pengelolaan K3 pada instalasi dan pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Kriteria kesiapan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi/ penjangkauan - Koordinasi - Peningkatan kapasitas - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi 2. Surat edaran 3. Rapat koordinasi (luring/daring) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Diseminasi dan sosialisasi GRM 6. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 7. Pengolahan data SIM 8. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Eventual 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus 6. Menerus 7. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Jejaring Puskesmas	Poskesdes Pustu	- Persiapan dan perencanaan instalasi dan pengoperasian alat kesehatan (dokumen proyek) - Pengelolaan K3 pada instalasi dan pengoperasian	- Sosialisasi - Peningkatan kapasitas - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi 2. Surat edaran 3. Pelatihan teknis/workshop 4. Diseminasi dan sosialisasi saluran	1. Eventual 2. Awal proyek 3. Eventual 4. Menerus 5. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	Posyandu	alat kesehatan (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)		pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 5. Pengelolaan saluran keluhan/umpan balik (GM) 5. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)		- Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Vendor dan penyedia layanan	Penyedia alat Distributor	- Penyediaan alat kesehatan dengan orientasi industri hijau dan rendah emisi (ESMF) - Pengelolaan K3 pada distribusi, instalasi, dan pengoperasian alat kesehatan sesuai standar (ESMF) - Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam implementasi proyek (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Transparansi pengadaan dan rencana distribusi, termasuk kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan (dokumen proyek)	- Koordinasi/sosialisasi - Konsolidasi (harga, spesifikasi, perawatan, garansi, dll.) - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi 3. Konsolidasi (mengacu pada katalog dan dokumen kontrak) 4. Pengolahan data SIM 5. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Awal proyek 4. Menerus 5. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	Ekspedisi	- Pengelolaan K3 pada distribusi dan instalasi alat kesehatan sesuai standar (ESMF) - Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam implementasi proyek (ESMF) - Transparansi rencana distribusi, termasuk pemeliharaan alat kesehatan (dokumen Proyek)	- Koordinasi/ sosialisasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi 3. Pengolahan data SIM 4. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Menerus 4. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
	Perusahaan pengelolaan limbah	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF)	Koordinasi/sosialisasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi	1. Berkala 2. Awal proyek	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Masyarakat / Pasien	Pasien Ibu dan anak Lansia Penyandang disabilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Masyarakat adat	- Informasi risiko K3 pada pengoperasian alat kesehatan(ESMF) - Informasi pemanfaatan alkes pada layanan kesehatan (dokumen proyek) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi - Saluran pengaduan/keluhan - Penjangkauan oleh Kader - Penggunaan bahasa setempat ke individu/	1. Publikasi sosialisasi K3 alkes bagi masyarakat 2. Publikasi sosialisasi terkait proyek secara umum 3. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
			masyarakat dengan kendala bahasa			
Konsultan	Konsultan	Informasi pengadaan dan rencana distribusi (dokumen proyek)	Koordinasi	Rapat koordinasi (luring / daring)	Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Kader	Kader	- Pengelolaan K3 pada pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi/konsultasi - Peningkatan kapasitas - Saluran pengaduan/keluhan - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Publikasi sosialisasi K3 alkes bagi kader 3. Pelatihan teknis/ workshop/refreshment (mengacu pada modul pelatihan kader) 4. E-learning (pada platform daring) 5. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 6. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Awal proyek 2. Berkala 3. Berkala 4. Berkala 5. Menerus 6. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	- Pengelolaan K3 pada pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM) - Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Pengungkapan dokumen proyek - Pelibatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas - Saluran pengaduan/keluhan	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Rapat koordinasi (luring/daring) 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Diseminasi dan sosialisasi saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Awal proyek 2. Berkala 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Rumah Sakit Rujukan	Rumah Sakit Rujukan	Pelaksanaan pelayanan kesehatan: sistem rujukan layanan kesehatan dan pengelolaan limbah (ESMF)	- Koordinasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi (luring/daring) 2. Pengolahan data SIM 3. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Menerus 3. Berkala	- Bagian Umum
PIHAK BERKEPENTINGAN						

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Prov, Kota/Kab)	- Pengungkapan dokumen pengelolaan dampak sosial dan lingkungan (ESMF dan SEP, termasuk GRM) - Transparansi pengadaan dan rencana distribusi alat kesehatan sesuai lingkup kewenangan masing-masing - Penyiapan, sosialisasi, dan implementasi pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Peningkatan kapasitas (khususnya terkait pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, pengecekan pengelolaan dan pemanfaatan alkes) - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Surat edaran 3. Rapat koordinasi (luring/daring) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Diseminasi dan sosialisasi GRM 6. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 6. Pengolahan data SIM 7. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Eventual 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus 6. Menerus 7. Berkala	- Bidang Kesmas - Bidang Yankes - Bidang Perencanaan - Bidang P2P
	Kepala Desa/Lurah	Transparansi pengadaan dan rencana distribusi alat kesehatan di tingkat desa/kelurahan (dokumen proyek)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Rapat koordinasi (luring/daring)	1. Eventual 2. Berkala	- Bidang Kesmas - Bidang Yankes - Bidang Perencanaan - Bidang P2P
Lembaga Internasional	WB ADB AIIB WHO (Konsultan Alkes)	- Pengungkapan dokumen pengelolaan dampak sosial dan lingkungan (ESMF dan SEP, termasuk GRM) - Transparansi pengadaan	- Koordinasi - Pengungkapan dokumen proyek	1. Rapat koordinasi (luring/daring) 2. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi	1. Berkala 2. Berkala 3. Berkala 4. Menerus 5. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
		dan rencana distribusi alat kesehatan (dokumen proyek) - Implementasi pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Monitoring-evaluasi	proyek (khususnya safeguards) 3. Pelaporan pengelolaan saluran pengaduan/ keluhan dan umpan balik (GM) 4. Pengolahan data SIM 5. Pelibatan dalam pengecekan lapangan (virtual/langsung)		Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
LSM	LSM	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Layanan Kesehatan (dokumen proyek) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Identifikasi lembaga - Sosialisasi/konsultasi - Pengungkapan dokumen proyek - Saluran pengaduan/keluhan	1. Pemetaan LSM yang kredibel (long-list / short-list) 2. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards) 4. Diseminasi dan sosialisasi GRM dan pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Awal proyek 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Media	Media	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Layanan Kesehatan (dokumen proyek)	- Sosialisasi/konsultasi - Pengungkapan dokumen	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi	1. Awal proyek 2. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
			proyek	proyek (khususnya safeguards)		- Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Organisasi Masyarakat	Organisasi Keagamaan	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Layanan Kesehatan (dokumen proyek)	- Sosialisasi/konsultasi - Kunjungan lapangan/pendekatan langsung - Pengungkapan dokumen proyek	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Pendekatan langsung untuk penginformasian kegiatan proyek 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards)	1. Awal proyek 2. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

TABEL RINGKASAN DARI RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN SIHREN

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
PENERIMA DAMPAK						
Rumah Sakit	RS Rujukan RS Pengampu (Nasional, Regional, Diampu) UPT Vertikal RSUD (Prov, Kota/Kab)	- Perencanaan program (dokumen proyek) - Perbaikan fasilitas dan pengelolaan limbah (ESMF) Implementasi pengadaan: - Distribusi dan instalasi-Fasyankes - Sosialisasi risiko K3 pengoperasian alat Monitoring dan Evaluasi (ESMF) - Tata cara pelaksanaan penanganan keluhan atau umpan balik (GRM) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	- Koordinasi data dan SDM - Monitoring dan evaluasi - Program pengampuan - Pengembangan Bank Data - Monitoring GM	- Rapat Koordinasi - Site visit - Pendampingan pelayanan - Peningkatan kapasitas/pelatihan - Pengembangan Bank Data	- Perminggu - 1x perbulan	Dit. PKR Dit. Fasyankes
Vendor/ Industri	Vendor Penyedia Alkes Industri Alkes	-Permintaan pengelolaan K3 kegiatan distribusi, instalasi dan standar pengelolaan alat (ESMF) - Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender (ESMF) Katalog alkes untuk kategori hijau (emisi karbon dan non merkuri) (ESMF)	- Sosialisasi, katalog, dokumen kontrak, konsolidasi (harga, spesifikasi, perawatan, garansi, dll) - Monev	- Proses pengadaan - Site visit (virtual ataupun langsung)	Di awal pengadaan Eventual	PBJ Ditjen. Farmalkes
Masyaraka	Pasien	- Sosialisasi risiko K3	- Konsultasi	- Publikasi	Eventual	Roren

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
t / Pasien	Perempuan dan anak Masyarakat umum Masyarakat sekitar RS Masyarakat adat, kepala suku Tokoh masyarakat Tokoh agama	pengoperasian alat (ESMF) - Mekanisme penanganan keluhan (GRM) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	publik (umum) Rekrutmen/pelibatan masyarakat (perempuan, masyarakat local) di kegiatan renovasi - Sosialisasi melalui poster risiko K3 alat dan persetujuan penggunaan alat	- Forum konsultasi - Rekrutmen - Surat Persetujuan penggunaan		
Konsultan	Konsultan Badan akreditasi	Informasi pengadaan dan rencana distribusi (Dokumen proyek)	Koordinasi	Rapat koordinasi (luring /daring)	Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Tenaga Kesehatan	Pimpinan RS Pengelola program kesling di RS Komite/unit pengaduan di RS	- Sosialisasi Risiko K3 Pengoperasian alat & Pemeliharaan alat (ESMF) - Capacity Building Pengelolaan limbah (ESMF)	- Pelatihan oleh vendor - Penyusunan buku manual kepada nakes	- Workshop pelatihan - Dokumen kontrak dalam Bahasa Indonesia	Setelah alat diterima	PBJ

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	Komite/unit keselamatan kerja Kesling dan PPI RS	- Tata cara pelaksanaan penanganan keluhan atau umpan balik (ESMF) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	- Monitoring pelaksanaan penanganan keluhan			
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Prov, Kota/Kab)	- Sosialisasi Risiko K3 Pengoperasian alat (ESMF) - Tata cara pelaksanaan penanganan keluhan atau umpan balik (GRM) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Monitoring GM (Rokomyanlik) - BAST alat kesehatan	- Pertemuan sosialisasi, surat edaran - Rapat koordinasi	Berkala	Roren Rokeu
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	Sosialisasi risiko K3 Pengoperasian alat kedalam rencana: (ESMF) - Penyiapan standarisasi layanan Kesehatan (SDM, sarana prasarana) - Penyediaan tenaga spesialis - Tata cara pelaksanaan penanganan keluhan atau umpan balik dan pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	Fasilitasi kegiatan standarisasi Peningkatan kapasitas Nakes untuk penggunaan CAPD (untuk ginjal)	Rapat koordinasi Workshop Pelatihan	Berkala Eventual	Dit. PKR Ditjen Nakes
PIHAK BERKEPENTINGAN						
Badan Legislatif	DPR	- Transparansi dan secure anggaran pusat /APBN (DPR) - Transparansi dan secure	- Pembahasan anggaran sector	- Konsultasi publik - Rapat dengar pendapat (DPR) untuk	Eventual	Roren

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	DPRD	anggaran daerah/APBD (DPRD) – untuk rehabilitasi fasilitas	Kesehatan pusat (DPR) dan daerah (DPRD) - Konsultasi DPRD ke Kemenkes terkait rehabilitasi - Konsultasi RS ke DPRD	pembahasan anggaran - Pertemuan konsultasi/audiensi		
K/L lain	Bappenas Kemenperin Kemendag KemenPUPR LKPP Bapeten	- Transparansi pengadaan dan rencana distribusi (dokumen proyek) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	- Koordinasi - Penguatan kapasitas	- Rapat koordinasi - Workshop	- Berkala (rapat koordinasi) - Eventual (workshop)	Roren
Pemerintah Daerah	Pejabat daerah Bappeda Dinas PU Pemerintah Desa/Kelurahan RS setempat	- Transparansi pengadaan dan rencana distribusi (dokumen proyek) - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP) - Sosialisasi pelaksanaan penanganan keluhan (GM)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Monitoring GM (Rokomyanlik) - BAST alat kesehatan	- Pertemuan sosialisasi, surat edaran - Rapat koordinasi	Berkala	Roren Rokeu
Lembaga Internasional	WB IsDB AIIB	Transparansi pengadaan dan rencana distribusi (dokumen proyek)	Koordinasi	Rapat koordinasi	Berkala	KGTK
Asosiasi	Gakeslab Aspaki	- Transparansi pengadaan dan rencana distribusi (dokumen proyek)	Sosialisasi	Konsultasi publik	Eventual	- Ditjen Yankes - Ditjen

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
		- Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)				Kesmas
LSM	Yayasan/LSM/Paguyuban penyakit tertentu	- Transparansi pengadaan dan rencana distribusi - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP) - Mekanisme penanganan keluhan (GM) proyek	Sosialisasi	Konsultasi publik	Di awal	Roren
Media	Media	- Transparansi pengadaan (*Positive framing*) - Mekanisme penanganan keluhan (GM) proyek - Pengungkapan dokumen Safeguard (ESMF dan SEP)	Sosialisasi	Konsultasi publik	Eventual	Rokom

TABEL RINGKASAN DARI RENCANA KEGIATAN PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK KOMPONEN InPULS

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
PENERIMA DAMPAK						
Laboratorium Kesehatan	Labkesmas (Tier 1 dan 2) Labkesda (Tier 4 dan 5)	- Pengelolaan K3 pada instalasi dan pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Persiapan dan perencanaan instalasi dan pengoperasian alat kesehatan, termasuk rehabilitasi laboratorium kesehatan (dokumen proyek) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi - Koordinasi - Peningkatan kapasitas - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi 2. Surat edaran 3. Rapat koordinasi (luring/daring) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 6. Pengolahan data SIM/updating ASPAK 7. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Eventual 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus 6. Menerus 7. Berkala	- Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Farmalkes
Penyedia dan vendor	Principal peralatan Labkesmas	- Penyediaan alat kesehatan dengan orientasi industri hijau dan rendah emisi (ESMF) - Transparansi rencana distribusi, termasuk pemeliharaan alat kesehatan (dokumen proyek)	- Koordinasi/ sosialisasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi	1. Berkala 2. Awal proyek	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	Penyedia alat Distributor	- Penyediaan alat kesehatan dengan orientasi industri hijau dan rendah emisi (ESMF) - Pengelolaan K3 pada distribusi, instalasi, dan pengoperasian alat kesehatan sesuai standar (ESMF) - Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam implementasi proyek (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Transparansi pengadaan dan rencana distribusi, termasuk kalibrasi dan pemeliharaan alat kesehatan (dokumen proyek) - mekanisme penanganan keluhan (GRM)	- Koordinasi/sosialisasi - Konsolidasi (harga, spesifikasi, perawatan, garansi, dll.) - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi 3. Konsolidasi (mengacu pada katalog dan dokumen kontrak) 4. Pengolahan data SIM 5. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Awal proyek 4. Menerus 5. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
	Ekspedisi	- Pengelolaan K3 pada distribusi dan instalasi alat kesehatan sesuai standar (ESMF) - Pencegahan kekerasan berbasis gender dalam implementasi proyek (ESMF) - Transparansi rencana distribusi, termasuk	- Koordinasi/sosialisasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi 3. Pengolahan data SIM 4. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Menerus 4. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
		pemeliharaan alat kesehatan				Farmalkes
	Pengirim sampel khusus	Pengelolaan K3 pada pengoperasian alat kesehatan sesuai standar (dokumen proyek) - mekanisme penanganan keluhan (GRM)	Koordinasi/sosialisasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi	1. Berkala 2. Awal proyek	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
	Perusahaan pengelolaan limbah	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF)	Koordinasi/sosialisasi	1. Rapat koordinasi 2. Pertemuan sosialisasi	1. Berkala 2. Awal proyek	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Masyarakat	Masyarakat	- Transparansi risiko K3 pada pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Transparansi pemanfaatan alkes pada laboratorium kesehatan (dokumen proyek) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi - Saluran pengaduan/keluhan	1. Publikasi sosialisasi K3 alkes bagi masyarakat 2. Publikasi sosialisasi terkait proyek secara umum 3. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Berkala 2. Awal proyek 3. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
Konsultan	Konsultan Penilai *biosafety* lab, badan penyedia sertifikat dan akreditasi	Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek)	Koordinasi	1. Rapat koordinasi (luring/daring)	1. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Organisasi Profesi	Organisasi Profesi	- Pengelolaan K3 pada pengoperasian alat kesehatan (ESMF) - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait pengelolaan limbah medis (ESMF) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM) - Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Pengungkapan dokumen proyek - Pelibatan dalam kegiatan peningkatan kapasitas - Saluran pengaduan/keluhan	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Rapat koordinasi (luring/daring) 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Diseminasi GRM, termasuk informasi pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Awal proyek 2. Berkala 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Sistem Rujukan	Puskesmas Laboratorium KKP	Pelaksanaan pelayanan kesehatan: sistem rujukan layanan kesehatan dan pengelolaan limbah kepada laboratorium kesehatan Tier	- Koordinasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi (luring/daring) 2. Pengolahan data SIM 3. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Menerus 3. Berkala	- Bagian Umum

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
		lebih tinggi (ESMF)				
Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan (Provinsi, Kota/Kab) Badan pemerintahan lainnya untuk perijinan	- Pengungkapan dokumen pengelolaan dampak sosial dan lingkungan (ESMF dan SEP) - Transparansi pengadaan dan rencana distribusi alat kesehatan sesuai lingkup kewenangan masing-masing (dokumen proyek) - Penyiapan lahan untuk pembangunan laboratorium kesehatan, jika belum tersedia (dokumen proyek) - Penyiapan, sosialisasi, dan implementasi pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Sosialisasi dan konsultasi - Koordinasi - Peningkatan kapasitas (khususnya terkait pengelolaan risiko sosial dan lingkungan, pengecekan pengelolaan dan pemanfaatan alkes) - Monitoring-evaluasi	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Surat edaran 3. Rapat koordinasi (luring/daring) 4. Pelatihan teknis/workshop 5. Pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM) 6. Pengolahan data SIM 7. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Eventual 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Eventual 5. Menerus 6. Menerus 7. Berkala	- Bidang Kesmas - Bidang Yankes - Bidang Perencanan - Bidang P2P
PIHAK BERKEPENTINGAN						
Jejaring Labkesmas	Rumah Sakit Laboratorium Perguruan Tinggi Laboratorium lain (K/L lain dan swasta)	Pelaksanaan pelayanan kesehatan: sistem rujukan layanan kesehatan dan pengelolaan limbah dari/ke laboratorium kesehatan (ESMF)	- Koordinasi - Monitoring-evaluasi	1. Rapat koordinasi (luring/daring) 2. Pengolahan data SIM 3. Pengecekan lapangan (virtual/langsung)	1. Berkala 2. Menerus 3. Berkala	- Bagian Umum
Lembaga Internasional	WB ADB AIIB (perlu konfirmasi)	- Pengungkapan dokumen pengelolaan dampak sosial dan lingkungan (ESMF dan	- Koordinasi - Pengungkapan	1. Rapat koordinasi (luring/daring) 2. Pengungkapan	1. Berkala 2. Berkala 3. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
	WHO (Konsultan Alkes)	SEP, termasuk mekanisme penanganan keluhan) - Transparansi pengadaan dan rencana distribusi alat kesehatan (dokumen proyek) - Implementasi pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	dokumen proyek - Monitoring-evaluasi	dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards) 3. Pelaporan pengelolaan saluran pengaduan/ keluhan dan umpan balik (GM) 4. Pengolahan data SIM 5. Pelibatan dalam pengecekan lapangan (virtual/langsung)	4. Menerus 5. Berkala	- Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
LSM	LSM	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Laboratorium Kesehatan (dokumen proyek) - Mekanisme pengelolaan keluhan dan umpan balik (GM)	- Identifikasi lembaga - Sosialisasi/konsultasi - Pengungkapan dokumen proyek - Saluran pengaduan/keluhan	1. Pemetaan LSM yang kredibel (long-list / short-list) 2. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards) 4. Diseminasi GRM dan informasi pengelolaan saluran pengaduan/keluhan dan umpan balik (GM)	1. Awal proyek 2. Awal proyek 3. Berkala 4. Menerus	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

Kategori	Pemangku Kepentingan	Topik	Strategi Pelibatan	Kegiatan Pelibatan	Waktu	PIC
Media	Media	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Laboratorium Kesehatan (dokumen proyek)	- Sosialisasi/konsultasi - Pengungkapan dokumen proyek	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards)	1. Awal proyek 2. Berkala	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes
Organisasi Masyarakat	Organisasi Keagamaan	- Transparansi Pengadaan dan Rencana Distribusi (dokumen proyek) - Transparansi Pemanfaatan Alkes pada Layanan Kesehatan (dokumen proyek)	- Sosialisasi/konsultasi - Kunjungan lapangan/pendekatan langsung - Pengungkapan dokumen proyek	1. Pertemuan sosialisasi/ konsultasi publik 2. Pendekatan langsung untuk penginformasian kegiatan proyek 3. Pengungkapan dokumen rencana dan laporan implementasi proyek (khususnya safeguards)	1. Awal proyek 2. Berkala 3. sebelum dan sesudah konsultasi publik, dan kapanpun terdapat perubahan	- Setditjen - Ditjen Kesmas - Ditjen P2P - Ditjen Yankes - Ditjen Tenkes - Ditjen Farmalkes

LAMPIRAN F SALINAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKKAN FOCAL POINT PERSIAPAN PROYEK SIHREN, SOPHI DAN INPULS

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)

GERMAS

Nomor : KS.02.03/A/32589/2023 24 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukkan *Focal Point* Persiapan Proyek SIHREN, SOPHI, INPULS

Yth.
1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Inspektur Jenderal

Kementerian Kesehatan

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Persiapan Proyek PLN Baru (SIHREN, SOPHI, INPULS) tanggal 5 Juli 2023 dan rapat Penyiapan Daftar Kegiatan bersama Bappenas pada tanggal 13 Juli 2023 serta mempertimbangkan waktu persiapan yang pendek (tahun 2023), kami mencatat perlu adanya *focal point* untuk memastikan proses persiapan dapat berjalan secara paralel pada setiap area kerja (**lampiran 1**).

Sehubungan hal tersebut, kami harap Saudara dapat menugaskan *focal point (*sesuai lampiran 1) untuk dapat melaksanakan koordinasi secara paralel baik internal Kemenkes maupun eksternal yang mana secara khusus tercantum di area kerja pada lampiran 1. Surat ini akan diperbarui apabila di kemudian hari terdapat area kerja tambahan yang belum tercakup. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi **sdri. Dina (085718012109).**

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Tembusan:
1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Eselon II terkait (sesuai lampiran)
3. World Bank Jakarta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran
Nomor : KS.02.03/A/32589/2023
Tanggal : 24 Juli 2023

DAFTAR PEJABAT SEBAGAI *FOCAL POINT*

No	Jabatan	Area Kerja	Tugas Detail
1	Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan	Teknis Pelayanan Kesehatan	• Mengawal proses pinjaman proyek SIHREN • Melakukan perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk rencana implementasi • Melakukan perbaikan/pemutakhiran Readiness Criteria (RC) SIHREN berdasarkan masukan Bappenas dan pemutakhiran lokus/ kebutuhan dan unit • Mendukung persiapan dokumen Daftar Kegiatan SIHREN • Melakukan koordinasi dengan lintas unit kerja selama proses penyiapan • Menyiapkan dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis untuk penggunaan Banper pada proyek SIHREN • Menyediakan data yang dibutuhkan terkait penyusunan dokumen Stakeholder Engagement Plan (SEP) • Melaporkan secara berkala dalam proses persiapan pinjaman proyek SIHREN • Hal-hal lain terkait persiapan proyek SIHREN
2	Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan		• Memberikan dukungan pada penyediaan data untuk proyek SIHREN
3	Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Teknis Kesehatan Masyarakat	• Mengawal proses pinjaman proyek SOPHI dan InPULS • Melakukan perencanaan dalam memperhitungkan kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk rencana implementasi • Melakukan perbaikan/pemutakhiran Readiness Criteria (RC) SOPHI dan InPULS berdasarkan masukan Bappenas dan pemutakhiran lokus/ kebutuhan dan unit • Mendukung persiapan dokumen Daftar Kegiatan SOPHI dan InPULS • Melakukan koordinasi dengan lintas unit kerja selama proses penyiapan • Menyiapkan dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis untuk penggunaan Banper pada proyek SOPHI dan InPULS • Menyediakan data yang dibutuhkan terkait penyusunan dokumen Stakeholder Engagement Plan (SEP) • Melaporkan secara berkala dalam proses persiapan pinjaman proyek SOPHI dan InPULS • Hal-hal lain terkait persiapan proyek SOPHI dan InPULS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jabatan	Area Kerja	Tugas Detail
4	Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat		• Memberikan dukungan pada penyediaan data untuk proyek SOPHI dan InPULS
5	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa	• Mempersiapkan pemaketan pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS • Mempersiapkan proses bidding tender pengadaan alat kesehatan melalui pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS • Melaporkan secara berkala dalam proses persiapan pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS • Hal-hal lain terkait pengadaan barang/jasa pada proyek SIHREN, SOPHI dan InPULS
6	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	Perencanaan dan Anggaran	• Memastikan bahwa dana tersedia di awal pagu indikatif tahun 2024 • Memfasilitasi rencana revisi percepatan penarikan Pinjaman Luar Negeri di awal tahun 2024 (triwulan I). • Melakukan koordinasi dan mengawal seluruh proses pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS • Melaporkan secara berkala proses persiapan pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS kepada pimpinan • Hal-hal lain terkait perencanaan dan penganggaran proyek SIHREN, SOPHI dan InPULS
7	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Keuangan	• Memastikan mekanisme hibah aset hasil PLN dari Pusat ke Daerah yang digunakan dalam pinjaman ini sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku • Hal-hal lain terkait keuangan proyek SIHREN, SOPHI dan InPULS
8	Kepala Biro Hukum	Regulasi	• Menyelesaikan pembuatan regulasi sebagai pendukung pinjaman proyek SIHREN, SOPHI, dan InPULS • Hal-hal lain terkait regulasi dalam pelaksanaan proyek SIHREN, SOPHI dan InPULS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

No	Jabatan	Area Kerja	Tugas Detail
9	Direktur Penyehatan Lingkungan	ESF (*Environmental and Social Framework) (untuk Environmental)*	• Bersama dengan Technical Assistance World Bank, menyusun dokumen Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), Environmental and Social Management Frame (ESMF), Environmental and Social Code of Practice (ESCOP) • Menyediakan data yang dibutuhkan terkait penyusunan dokumen Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), Environmental and Social Management Frame (ESMF), Environmental and Social Code of Practice (ESCOP)
10	Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur 1 dan Inspektur 2	Akuntabilitas	• Mengawal dan memastikan seluruh proses telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait • Memberikan masukan terkait akuntabilitas

Sekretaris Jenderal,

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN G DIAGRAM ALIR DARI SALURAN PENANGANAN KELUHAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SOP Pelayanan Pengaduan di Halo Kemenkes

No	Aktivitas/Uraian Tugas	Pelaksana						Mutu Baku			Ket
		Kepala Rokomyanmas	Koor. Kel. Subs. Yanmas	Sub Koor. Kel. Sub-Subs. Dumas	Pranata Humas	Petugas Halo Kemenkes	pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan ke Koordinator Pelayanan Masyarakat untuk penyelenggaraan pengaduan di Halo Kemenkes								2 menit	Catatan Arahan	
2	Memberikan instruksi Kepada Sub Koordinator untuk menjadi Penanggung Jawab Layanan Pengaduan							Catatan Arahan	2 menit	Catatan Instruksi	**Penetapan Jam Kerja Petugas 3 Shift selama 24 Jam di hari kerja dan Lembur di Sabtu-Minggu dan/ hari libur nasional**
3	Menugaskan Pranata Humas untuk menjadi pengawas layanan pengaduan							Catatan Instruksi	2 menit	Catatan Penugasan	
4	Menugaskan kepada Petugas Halo Kemenkes melakukan Layanan Pengaduan melalui berbagai kanal komunikasi							Catatan Penugasan	2 menit	Catatan Penugasan	
5	Petugas Halo Kemenkes menerima pengaduan melalui berbagai kanal komunikasi							Sistem Informasi dan Pengaduan	2 menit	Catatan layanan	
6	Petugas Halo Kemenkes melakukan analisis, mengklarifikasi dan menjawab pertanyaan dari masyarakat							Sistem Informasi dan Pengaduan	2 menit	Catatan layanan	
7	Apabila informasi dan pengaduan tidak tersedia akan dijawab langsung oleh petugas. Bila tidak tersedia informasi maka akan dilakukan hold/callback							Sistem Informasi dan Pengaduan dan catatan petugas	2 menit	Catatan layanan	**Apabila Informasi/Pengaduan tidak tersedia di petugas, maka pranata humas (pengawas) mencari info/pengaduan tersebut hingga ke level sub koordinator**
8	Petugas melakukan input data di sistem informasi dan pengaduan							Sistem Informasi dan Pengaduan	2 menit	Catatan layanan	
9	Petugas menanyakan kembali jika penelpon masih membutuhkan informasi atau memberikan pengaduan. Bila tidak petugas mengakhiri layanan							Sistem Informasi dan Pengaduan	< 60 detik	Rangkaian layanan pengaduan telah dilakukan	

SOP Interaksi melalui Telepon

No	Aktivitas/Uraian Tugas	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket
		Kepala Rokomyanmas	Koor. Kel. Subs. Yanmas	Sub Koor. Kel. Sub-Subs. Dumas	Pranata Humas	Petugas Halo Kemenkes	pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Langkah awal interaksi melalui telepon							e-centrix	30 detik	telpon berdering	
2	Pelanggan menghubungi layanan 1500 567							telepon	10 detik	*Greeting* operator	
2	Petugas mencatat identitas penelpon							sistem SIAP	< 30 detik	menerima permintaan informasi, saran dan pengaduan	
3	Petugas Halo Kemenkes melakukan analisa sekaligus mengklarifikasi pertanyaan dari pemohon							sistem SIAP	< 30 detik	klarifikasi pertanyaan	
4	Petugas menentukan permintaan penelpon berupa informasi/saran/pengaduan							sistem SIAP	< 30 detik	input data penelpon	
	Apabila informasi tersedia akan dijawab langsung oleh petugas. Bila tidak tersedia informasi maka akan dilakukan hold/callback							sistem SIAP	< 60 detik	penyampaian informasi , saran dan pengaduan.bila tidak tersedia maka akan dilakukan koordinasi dengan unit terkait	
5	Petugas menanyakan kembali jika penelpon masih membutuhkan informasi atau memberikan pengaduan. Bila tidak petugas menutup telepon							sistem SIAP	< 60 detik	rangkaian pelayananan telah dilakukan	

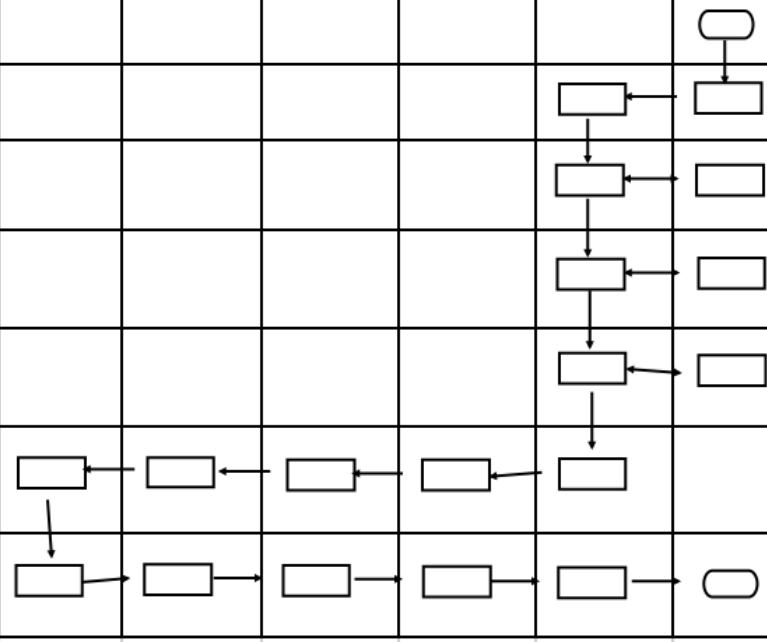

SOP Interaksi melalui Email

No	Aktivitas/Uraian Tugas	PELAKSANA						Mutu Baku			Ket
		Kepala Rokomyanmas	Koor. Kel. Subs. Yanmas	Sub Koor Kel. Sub-Subs Dumas	Pranata Humas	Petugas Halo Kemenkes	pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Langkah awal interaksi adalah membuka aplikasi contact center Halo Kemenkes dan menu Email							sistem SIAP	< 30 detik	Membuka email masuk	
2	Membaca dan menganalisa email masuk dengan memperhatikan nama dan alamat pelanggan							sistem SIAP	5 menit	Mengetahui informasi yang dibutuhkan pelanggan	
2	Email yang kurang jelas permintaan informasi/saran/pengaduan, petugas melakukan klarifikasi							sistem SIAP	5 menit	klarifikasi pertanyaan	
3	Petugas merespon informasi/saran/pengaduan kepada pelanggan apabila informasi telah tersedia							sistem SIAP	10 menit	layanan informasi/saran/pengaduan	
4	Petugas mengirimkan informasi yang diperlukan pelanggan							sistem SIAP	10 menit	layanan informasi/saran/pengaduan	
	Apabila informasi tidak tersedia maka dilakukan koordinasi dengan pejabat internal dan unit terkait							sistem SIAP	10 hari kerja	Koordinasi dengan unit terkait	
5	Apabila terjadi penolakan maka harus dibuatkan SK PPID							sistem SIAP	10 hari kerja + 7 hari Kerja	rangkaian pelayananan telah dilakukan	

Prosedur Pengelolaan Pengaduan tatap Muka

No	Aktivitas / Uraian Tugas	PELAKSANA				Mutu Baku			Ket
		Kepala Rokomyanmas	Koor. Kel. Subs. Yanmas	Sub Koor Kel Sub-Subs. Dumas	Pranata Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memberikan arahan kepada Koor. Kel. Subs. Yanmas untuk membuat kegiatan pengaduan tatap muka					Rencana kegiatan pelayanan informasi	5 menit	Catatan arahan dari Karokomyanmas	
2	menginstruksikan Sub Koor. Kel. Sub-Subs. Yanmasuntuk membuat pengaduan tatap muka					Catatan arahan dari Karokomyanmas	5 menit	Catatan instruksi dari Koor. Kel. Subs. Yanmas	
3	Sub Koor. Kel. Sub-Subs. Yanmasmenugaskan Pranata Humas untuk bertugas menjadi petugas penerima pengaduan					Catatan instruksi dari Koor. Kel. Subs. Yanmas	60 menit	Catatan tugas	
4	menentukan jadwal petugas					Catatan tugas	30 menit	Jadwal kerja	jadwal petugas pelayanan dilakukan di hari kerja dan jam kerja
5	melakukan pelayanan pengaduan di tempat yang telah disediakan					catatan pelayanan	60 menit	Pendampingan dan bimbingan	
6	melaksanakan tindaklanjut pengaduan dengan bersurat kepada unit terkait, membuat surat balasan kepada pengadu setelah mendapatkan surat jawaban dari unit terkait					Pendampingan dan bimbingan	60 menit	Pelayanan pengaduan	
7	melaksanakan pengadministrasian umum dari semua rangkaian pengaduan yang tercatat					Pendampingan dan bimbingan	60 menit	Catatan	